

**KEPEDULIAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN TERHADAP
MASALAH SOSIAL**

(STUDY DI BEKAS LOKALISASI PANJANG)



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana S.sos Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh :

**NILAM PELITA BHAKTI
NPM : 1531040018**

Jurusan Pemikiran Politik Islam

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H / 2019 M

**KEPEDULIAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
TERHADAP MASALAH SOSIAL**

(STUDI DI BEKAS LOKALISASI PANJANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh

NILAM PELITA BHAKTI

NPM. 1531040018

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Drs. Effendi, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Kepedulian Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Masalah Sosial (Studi di Bekas Lokalisasi Panjang Bandar Lampung)

**Oleh:
Nilam Pelita Bhakti**

Penyimpangan norma atau penyakit dalam masyarakat yang dianggap sebagai suatu masalah sosial ialah prostitusi, sehingga sangat diperlukannya kepedulian khusus dengan adanya suatu masalah didalam kehidupan sosial seperti yang terjadi didaerah Panjang Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kepedulian anggota legislatif perempuan dalam mengatasi masalah sosial prostitusi yang terjadi dibekas lokalisasi Panjang Bandar Lampung. Dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepedulian anggota legislatif perempuan dalam mengatasi masalah sosial prostitusi yang terjadi dibekas lokalisasi Panjang Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian studi kasus (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif sebagai salah satu upaya eksplorasi dan klarifikasi terhadap suatu masalah, dan dalam teknik pengumpulan data menggunakan cara interview atau wawancara serta di lengkapi oleh beberapa dokumen, buku, artikel, dan jurnal. Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 6 anggota legislatif, sedangkan sumber data sekundernya adalah masyarakat lingkungan Way Lunik Kecamatan Panjang buku, dan artikel. Temuan dalam penelitian ini, tidak adanya kepedulian anggota legislatif perempuan terhadap masalah sosial yang terjadi diekslokalisasi Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang di Kota Bandar Lampung. Anggota legislatif perempuan hanya memberikan anggaran dan solusi dan saran kepada dinas pemerintahan yang turun secara langsung kelapangan tanpa mengetahui kondisi sesungguhnya dilapangan, serta program yang telah dilaksanakan hanya memiliki sedikit kesesuaian dalam solusi penyelesaian masalah social dengan kurangnya pemantauan atas pelaksanaan program sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah social prostitusi yang terjadi diekslokalisasi Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Adapun hambatan pada penyelesaian masalah sosial yang terjadi disebabkan oleh factor keterbatasan pada anggaran.

Kata kunci: Kepedulian, Masalah Sosial, Prostitusi, Legisla

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Nilam Pelita Bhakti

NPM : 1531040018

Program Studi : PemikiranPolitik Islam (PPI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“KEPEDULIAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN TERHADAP MASALAH SOSIAL (STUDY DI BEKAS LOKALISASI PANJANG)”**, adalah benar-benar karya sendiri, bukan jiplak karya orang lain, kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan sumber didalamnya. Apabila dikemudian hari skripsi saya ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab dan saya siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung ,

Penulis

Nilam Pelita Bhakti

NPM. 1531040018



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: JL. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**JUDUL SKRIPSI : KEPEDULIAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
TERHADAP MASALAH SOSIAL (STUDI DI BEKAS
LOKALISASI PANJANG)**

NAMA : Nilam Pelita Bhakti

NPM : 1531040018

JURUSAN : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam ujian munaqosah skripsi Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Effendi, M.Hum
NIP. 195807211986031004

Pembimbing II

Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si
NIP. 197801302011012004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si
NIP.197801302011012004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"KEPEDULIAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN TERHADAP MASALAH SOSIAL** Disusun Oleh: **NILAM PELITA BHAKTI**,
NPM : **1531040018**, Program Studi : **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**, telah diujikan
dalam sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan
Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis/17 Oktober 2019

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. Shonhaji, M.Ag.

Sekretaris Sidang : Yoga Irawan, M.Pd.

Penguji Utama : Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A.

Penguji Pendamping I : Drs. Effendi, M.Hum

Penguji Pendamping II: Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si.

DEKAN

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. M. Afif Anshori, M.Ag

60031319890031004



MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289)



PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa serta memberikan semangat, dukungan, dan motivasi selama penulis menuntut ilmu :

1. Ayahandaku Jafrizon dan Ibundaku Rohana yang paling aku cintai, yang telah membesarkan putrimu Nilam Pelita Bhakti dengan penuh kesabaran, kasih sayang luar biasa yang enggkau berikan, mendidik serta mengarahkan dengan baik dan selalu mendo'akan agar terwujudnya semua cita-cita yang mulia ini.
2. Saudara dan saudariku Kakakku Oktavalia Wulandari dan Adikku Indana Halwah Riqqa serta Keluarga Besar Jaseng Family yang telah memotivasi dan memberikan dukungan baik moril maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1).
3. Terimakasih untuk segalanya yang terus mendukung, serta menemani, mendengarkan keluh kesah dalam penyelesaian skripsi ini sampai akhir, Thanks for you M. Anwar Syahputra.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat menuntut ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga yang tidak bisa penulis lupakan.

RIWAYAT HIDUP

Nilam Pelita Bhakti, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 01 Juli 1997, Lahir sebagai anak ke dua dari tiga bersaudara dari orang tua tercinta Ayahanda Jafrizon dan Ibunda Rohana.

Jenjang pendidikan pertama di Taman Kanak-kanak (TK) di Kartika Jaya II-5 Bandar Lampung selesai pada tahun 2003, serta melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Kartika Jaya II-5 Bandar Lampung selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan studi ke Madrasa Tsanawiyah Diniyyah Putri Lampung selesai pada tahun 2012, kemudian meneruskan kembali ke Kuliatul Mualimat El-Islamiah Diniyyah Putri Lampung selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke UIN Raden Intan Lampung di jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis

Nilam Pelita Bhakti
NPM. 1531040018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **“KEPEDULIAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN TERHADAP MASALAH SOSIAL (STUDI DI BEKAS LOKALISASI PANJANG)”**

Shalawat serta salam senantiasa tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga dan pengikut yang taat pada ajaran-ajaran agama-Nya, yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah sampai zaman Islamiyah dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman kelak. Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Bandar Lampung dan Alhamdulillah telah dapat peneliti selesaikan sesuai dengan rencana. Dalam upaya penyelesaian ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, baik yang bersifat moral maupun material dan spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan hal tersebut, maka melalui skripsi ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak **Dr. H.M. Afif Anshori, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung dan Pembantu Dekan beserta Stafnya.
3. **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** selaku ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam serta ibu **Eska Prawisudawati Ulpa, M.si** selaku sekertaris jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
4. **Bapak Drs. Effendi, M.Hum** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan memberikan pengarahan yang sangat berarti dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap karyawan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpus UIN Raden Intan Lampung serta seluruh staf yang telah banyak membantu, menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada **Anggota Legislatif Perempuan Priode 2014-2019** Kota Bandar Lampung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini serta dengan senang hati untuk menjadi informan dalam penelitian.

8. Untuk sahabat-sahabatku Teman Seperjuangan (Yuli Purwanti, Emilia Susanti, Eka Zalika, Veny Alvionita, Zesy harviliana, M. Ilaham, Sandra Wijaya, Fakhurrazi, Ahmad Guntur) Terimakasih atas canda tawa selama penulis duduk dibangku kuliah, serta saling memotivasi dan saling menyemangati satu sama lain.
9. Teman-teman jurusan PPIkelas A yang selalu membantuku dan menemaniku dalam keadaan suka maupun duka yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas amal kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian. Penulis juga menyadari keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis, untuk itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan semoga skripsi ini berguna bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal'Alaamiin.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat memenuhi syarat sebagai tugas yang dibebankan kepada peneliti dan almamaterku, khususnya sebagai pemikiran kemajuan di bidang politik islam.

Bandar Lampung, Oktober 2019
Penulis,

(NILAM PELITA BHAKTI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	10

BAB II KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN TERHADAP MASALAH SOSIAL

A. Teori Perwakilan Menurut Para Ahli	17
1. Konsep Perwakilan.....	18
2. Teori-teori Perwakilan.....	18
3. Tipe Perwakilan Berkaitan Dengan Partai Politik	21
4. Sifat Lembaga Perwakilan.....	21
B. Teori Kepedulian.....	22
1. Bentuk-bentuk Kepedulian	24
2. Jenis-jenis Kepedulian.....	26
3. Dimensi Kepedulian	26
C. Fraksi dan Alat-alat Kelengkapan DPR	27
1. Definisi Anggota Legislatif	29
2. Hak dan Kewajiban Badan Legislatif Menurut UUD 1945.....	30
3. Fungsi Anggota Legislatif	31
4. Tugasdan Wewenang Anggota Legislatif.....	31
D. Teori Masalah-masalah Sosial.....	32
1. Timbulnya Masalah-masalah Sosial.....	33
2. Masalah Prostitusi	35
3. Teori Dramaturgi.....	37
E. Tinjauan Pustaka.....	42

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN PANJANG DAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Profil Kecamatan Panjang	44
1. Topografi Kecamatan Panjang.....	45
2. Administrasi Pemerintahan Kecamatan Panjang	45
3. Visidan Misi Kecamatan Panjang	46
4. Data Penduduk Kecamatan Panjang.....	48
B. Sejarah Lokalisasi Kecamatan Panjang.....	51
1. Kondisi Lingkungan Di Daerah Lokalisasi Panjang	52
2. Kondisi Keagamaan Di Daerah Lokalisasi Panjang	53
C. Profil Anggota Dewan Legislatif Perempuan DPRD Kota Bandar Lampung	55

BAB IV MASALAH SOSIAL PROSTITUSI ANALISIS ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Bentuk Kepedulian Anggota Legislatif Perempuan Dalam Mengatasi Masalah Sosial Prostitusi	61
1. Pengetahuan anggota legislative perempuan terhadap masalah social prostitusi dibekas lokalisasi kecamatan Panjang.....	61
2. Anggota legislatif perempuan hanya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.....	63
3. Tidak adanya kebijakan khusus pemerintah terhadap masalah social prostitusi	63
4. Kepedulian anggota legislatif perempuan khususnya komisi IV hanya sebatas tugas dinas kependudukan dan dinas kesehatan	65
5. Pandangan anggota legislatif perempuan pada komisi lain terhadap masalah sosial prostitusi	65
6. Hambatan anggota legislatif perempuan dalam penanggulangan masalah sosial prostitusi	69
B. Pengaruh Kepedulian Anggota Legislatif Perempuan Dalam Mengatasi Masalah Sosial Prostitusi	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Rekomendasi	75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

- 3 1. Daftar Camat Kecamatan Panjang
- 3 2. Data Penduduk Kecamatan Panjang Tahun 2018-2019
- 3 3. Data Penduduk Kelurahan Way Lunik Tahun 2018-2019
- 3 4. Data Penduduk Menurut Pekerjaan Kelurahan Way Lunik Tahun 2018-2019



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Konsultasi Bimbingan
2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
3. Surat Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Kesbangpol
6. Surat Balasan
7. Dokumentasi Pendukung
8. Kertas Keterangan iagiarisem



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam proposal ini adalah **“Kepedulian Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Masalah Sosial (Studi di Bekas Lokalisasi Panjang Bandar Lampung)”**. Menghindari kesalahan pemahaman dalam penjelasan variabel-variabel penelitian maka perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud atau arti dari variabel atau istilah yang terhadap pada judul. Hal tersebut selain untuk mempermudah pemahaman juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikendaki penulis.

Kepedulian berasal dari kata peduli yang memiliki makna menghiraukan, mengindahkan, atau memperhatikan. Seperti turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, kehidupan publik, pengambilan keputusan.¹

Anggota Legislatif Perempuan merupakan sosok yang dipilih oleh rakyat untuk menjadi harapan agar dapat menyampaikan aspirasi rakyat khususnya bagi kaum perempuan. Maka dapat ditarik kesimpulan di atas Kepedulian Anggota Legislatif perempuan adalah suatu tindakan yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam masalah sosial prostitusi untuk memperbaiki suatu keadaan. Bahwasannya yang kita ketahui UU No. 2 Tahun

¹Rich Devos, *Kepedulian Sosial*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.137

2008 memuat kebijakan yang mengharuskan dalam pencalonan anggota legislatif menyertakan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya 30% dengan fungsi dan peran yang sangat penting karena ada korelasi yang baik antara keterwakilan perempuan didalam lembaga tersebut, dapat membantu menghasilkan kebijakan yang betul-betul menjawab kebutuhan perempuan, dan meningkatkan kualitas perempuan.²

Masalah sosial adalah bentuk problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan karena adanya interaksi sosial yang kurang seimbang antara satu dengan yang lainnya, sehingga membutuhkan tindakan dalam upaya perwujudan solusinya. Masalah sosial ini bisa dalam bentuk masalah prostitusi.³

Berdasarkan istilah-istilah dalam penjelasan diatas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan judul skripsi “Kepedulian Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Masalah Sosial (Studi di Bekas Lokalisasi Panjang) Bandar Lampung” adalah sebuah kajian yang membahas tentang upaya yang dilakukan anggota legislatif perempuan untuk menindak lanjut permasalahan prostitusi sesuai dengan fungsi dan kebijakan dari anggota legislatif perempuan khususnya yang terjadi di daerah Panjang Kota Bandar Lampung.

²Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan DPR, DPRD RI

³Robert Louer, *Masalah-masalah Sosial*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2001), h. 228.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendasari penulis memilih judul yakni **“KEPEDULIAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAPAN MASALAH SOSIAL (Study Di Bekas Loklisasi Panjang Bandar Lampung) adalah :**

1. Penulis tertarik untuk mengangkat masalah Kepedulian Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Masalah Sosial (Studi di Bekas Lokalisasi Panjang) Bandar Lampung , karena ingin mengetahui bentuk kepedulian anggota legislatif perempuan dalam mengatasi masalah sosial prostitusi yang terjadi di bekas lokalisasi Panjang Bandar Lampung.
2. Kepedulian dari Anggota Legislatif Perempuan masih kurang peduli terhadap masalah sosial prostitusi di bekas lokalisasi Panjang Bandar Lampung.
3. Judul penelitian ini relevan dengan keilmuan yang sedang ditempuh yaitu Pemikiran Politik Islam dan tempat peneliti ini terjangkau oleh peneliti serta data-data yang dibutuhkan ada baik berupa teori (buku-buku) atau data lapangan.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Indonesia juga merupakan Negara yang berlandaskan kepada Pancasila. Dimana penduduknya diwajibkan menjunjung nilai-nilai etika

didalam kandungannya. Dilihat dari Pancasila sila ke-lima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang memiliki makna bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Dapat kita pahami dari penjelasan diatas bahwa sesama manusia dan sebagai makhluk sosial kita harus saling tolong menolong dan memiliki sikap peduli serta memperhatikan sesama manusia. Kepedulian merupakan suatu perasaan simpati yang mendalam terhadap penderitaan atau kemalangan orang lain, yang disertai oleh suatu hasrat untuk meringankan penderitaan tersebut atau untuk menghilangkan penyebabnya.⁴

Suatu bentuk penyimpangan norma atau penyakit dalam masyarakat yang dianggap sebagai suatu masalah sosial ialah prostitusi, sehingga sangat diperlukannya kepedulian khusus dengan adanya suatu masalah didalam kehidupan sosial seperti yang terjadi di daerah Panjang Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan tempat lokalisasi keberadaan daerah Panjang disebut Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Selatan. di wilayah Kecamatan Panjang dibagi menjadi delapan Kelurahan yaitu : Kelurahan Srengsem, Kelurahan Karang Maritim, Kelurahan Panjang Selatan, Kelurahan Panjang Utara, Kelurahan Pidada, Kelurahan Way Lunik, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Ketapang Kuala.

Dari delapan Kelurahan diatas peneliti ini fokus pada salah satu Kelurahan yang diindikasikan sebagai pusat atau tempat prostitusi itu

⁴Prof. Dr. Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, h. 177

dilakukan diantaranya yaitu Kelurahan Way Lunik. Masyarakat di Kelurahan Way Lunik mata pencahariannya sebagai pedagang, buruh, dan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Salah satu permasalahan sosial saat ini yang selalu dibicarakan untuk didiskusikan adalah masalah pelacuran, karena persoalan ini sudah ada sejak jaman kerajaan dan jaman penjajahan diseluruh Indonesia. Mulai dari dahulu sampai sekarang masalah pelacuran adalah masalah sosial yang sangat sensitif yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama. Pekerja seks komersial (PSK) merupakan problem sosial karena perbuatannya tidak bermoral dan merusak tatanan sosial masyarakat, serta menodai sakralisasi hubungan seksual.

Permasalahan tersebut dapat dilihat melalui kepedulian anggota legislatif perempuan terhadap masalah sosial prostitusi. Dalam hal kuota Anggota legislatif perempuan di Kota Bandar Lampung memiliki 30% keterwakilan perempuan sedangkan jumlah anggota legislatif perempuan saat ini hanya 6 orang atau 8,3% dari 50 anggota, maka jauh dari kuota yang telah ditentukan. Jadi kedudukan laki-laki yang lebih mendominasi dalam menentukan kebijakan publik, biasanya perempuan hanya menjadi peserta dan pendamping dalam menentukan kebijakan publik.

DPRD Kota Bandar Lampung mempunyai 8 Fraksi yang terdiri dari Fraksi PDIP, Golkar, PAN, PPP, Grindra, PKS, PKB, dan Nasdem. Komisi yang menangani masalah sosial berada dikomisi IV yang menangani tentang kesejahteraan sosial (pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan) yang

diketahui oleh Bpk. Hendrie Kurniawan dari fraksi PKS. Jumlah anggota legislatif perempuan yang menangani masalah sosial ada 2 orang masing-masing dari fraksi Nasdem dan Demokrat.⁵

Masalah-masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat Panjang Desa kampung Sawah Kecamatan Waylunik seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan masalah yang masih sulit untuk dihilangkan di daerah Panjang yaitu masalah prostitusi. Adapun sebelumnya tahun 2002 dilokalisasi Panjang yang dulunya dikenal dengan sebutan Pemandangan itu sudah ada dilakukannya penutupan lokalisasi karena adanya Peraturan Daerah No.15 Tahun 2002 tentang larangan prostitusi dan tuna susila di kota Bandar Lampung. Setelah diperbaharui keluar lagi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pasal 1 ayat 18 yang berisi “Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba. Awal mulai penutupan lokalisasi Panjang mulai tahun 2002 sampai tahun 2019 sudah berjalan 17 tahun. Berdasarkan dari tinjauan lapangan sampai sekarang masih adanya kegiatan prostitusi yang berjalan dengan lancar dan masih kurang adanya kepedulian dari anggota legislatif perempuan yang dilakukan di daerah Panjang dalam mengatasi masalah prostitusi.

⁵Ernita, SH. MH, Anggota Legislatif Perempuan dari Fraksi Demokrat, rekaman, Ballroom Hotel & Resto Emersia Lampung, 19 Oktober 2018.

Kartini Kartono, menyatakan bahwa perempuan menjadi pelacur karena mereka itu nymphomaniacs (kecanduan hubungan seks), ditinggalkan suami, sangat malas bekerja, tidak bermoral atau semata-mata karena uang.⁶

Perempuan dalam masalah Islam memiliki posisi dan martabat yang tinggi. Meneropong pembahasan diatas, sudah jelas mengharamkan prostitusi. Apabila kita melihat dalam perspektif Islam prostitusi mengacu pada zina dan hal ini pasti sangat dilarang oleh agama. Dalam Al-Qur'an dalil larangan zina dapat kita lihat pada ayat QS. Al israa; 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”⁷

Semestinya masalah-masalah sosial seperti prostitusi dapat perhatian lebih dari pemerintah dalam hal ini iyalah anggota legislatif perempuan sehingga akan menciptakan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Berpijak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan selanjutnya dituangkan kedalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “Kepedulian Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Masalah Sosial (Studi di Bekas Lokalisasi Panjang) Bandar Lampung”.

⁶Alison J. Murray, *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995), h. 126.

⁷Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Azzahra*. (Bandung : Syamil Qur'an 2007), h. 232

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus membahas mengenai bentuk kepedulian anggota Legislatif perempuan terhadap masalah sosial yaitu masalah prositusi serta pengaruhnya terhadap masyarakat yang berada di daerah Panjang Kecamatan Way Lunik Kota Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Apa bentuk kepedulian anggota legislatif perempuan dalam mengatasi masalah sosial prostitusi yang terjadi dibekas lokalisasi Panjang Bandar Lampung?
2. Bagaimana pengaruh dari kepedulian anggota legislatif perempuan dalam mengatasi masalah sosial prostitusi yang terjadi dibekas lokalisasi Panjang Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menentukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Demikian dengan peneliti yang akan penulis teliti memiliki tujuan khusus. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kepedulian anggota legislatif perempuan dalam mengatasi masalah sosial prostitusi yang terjadi di bekas lokasi Panjang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari Kepedulian anggota legislatif perempuan dalam mengatasi masalah sosial prostitusi yang terjadi di bekas lokasi Panjang Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup dua hal yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan lingkungan sosial masyarakat khususnya di bidang pemikiran politik Islam.

2. Secara Praktis

Sebagai mahasiswa jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI) penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang Kepedulian Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Masalah Sosial (Studi di Bekas Lokasi Panjang) Bandar Lampung sehingga dari kepedulian yang dilakukan Anggota Legislatif Perempuan yang

nantinya dapat menciptakan masyarakat yang dinamis serta memiliki pekerjaan yang baik khususnya di daerah Kecamatan Panjang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”.⁸ Metode penelitian sangat tergantung pada permasalahan dan sifat peneliti, sebelum penulis mengemukakan metode penelitian ini, ada baiknya kita mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan metode tersebut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang sempurna dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan metode yang mendukung. Dilihat dari jenis nya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), maksud nya adalah penelitian yang di lakukan dengan mengambil data yang ada di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi juga mengangkat realita tersebut

⁸Kholid Nurboco dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : PT.Bumi Aksara, Jakarta, 1997), h.11

secara apa adanya kemudian menginterpretasikan data yang diperoleh berdasarkan referensi yang relevan.⁹

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang dilakukan pada dasarnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif adalah “pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat secara sistematis dan akurat mengenai, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya”. Dalam hal ini peneliti akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Kepedulian Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Masalah Sosial (Studi di Bekas Lokalisasi Panjang) Bandar Lampung.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informal dan langsung mewawancarainya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primernya ada 6 orang dari Anggota Legislatif Perempuan masing-masing berada di Fraksi dua dari PDIP, dua dari NASDEM, dua lagi dari Demokrat yaitu:

⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32

¹⁰Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 159

- 1) Sri Ningsih Djamsari, dari Fraksi PDIP di komisi II
- 2) Hj. Ernita , dari Fraksi Demokrat di komisi II
- 3) Wiwik Anggraini, dari Fraksi PDIP di komisi III
- 4) Erika Novalia Sani, dari Fraksi Nasdem di komisi III
- 5) Nani Mayasari, dari Fraksi Nasdem di komisi IV
- 6) Pebriani Piska, dari Fraksi Demokrat di komisi IV

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti dari buku-buku, literatur, karya-karya dan masyarakat setempat daerah Panjang Kecamatan Way Lunik serta dokumentasi terkait objek penelitian.

Kedua data tersebut digunakan dengan saling melengkapi, karena data yang ada di lapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan kepustakaan. Dengan menggunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹¹

3. Metode Pengumpulan Data

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Agar diperoleh data yang benar-benar relevan perlu ada metode yang tepat untuk

¹¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2002), h.81

mengungkapkannya. Metode pengumpulan data ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan keadaan secara wajar dan yang sebenarnya terhadap suatu objek tanpa ada suatu usaha yang dipengaruhi untuk mempengaruhi, mengatur, memanipulasikannya. Di samping itu juga dapat menyaring data yang tidak objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui interview. Mengingat data yang didapat melalui wawancara kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat subjektivitas orang yang menyampaikan keterangan tersebut, dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.¹² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap kinerja anggota legislatif dengan cara media yang dibicarakan mengenai bentuk kepedulian anggota legislatif perempuan.

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi secara verbal seperti percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang penentuan jumlah diwawancara ditentukan berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang mempunyai pengaruh terhadap objek yang diteliti. Teknik

¹²M. Iqbal Hasan, op.cit. h.85

ini memberikan peluang yang wajar kepada responden untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam. Pada prinsipnya sama dengan metode angket, pertanyaannya diajukan secara tertulis, sedangkan pada wawancara pertanyaan diajukan secara lisan.¹³

Wawancara (*interview*) yang diajukan kepada anggota legislatif perempuan sebagai objek dari penelitian ini. Metode *interview* ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga data yang didapatkan akurat mengenai bentuk kepedulian dari anggota legislatif perempuan dan pengaruhnya bagi masyarakat Panjang Kecamatan Way Lunik terhadap masalah prostitusi.

Teknik wawancara dalam penelitian ini memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri yang membuat suasana menjadi rileks, sehingga dalam mendapatkan data tercapai sesuai keinginan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian. Sebagai objek yang diperhatikan dalam memperoleh informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (*paper*), tempat (*place*) dan kertas atau orang (*people*).¹⁴

¹³Cholid Nuroboko dan Ahmadi, op.cit. h. 85

¹⁴Ibid, h.120

Dokumentasi ini yang terkait dengan penelitian, yang diperoleh dari penelitian guna memastikan ataupun fakta, yaitu berupa foto-foto dokumentasi yang terkait dengan kepedulia anggota legislatif perempuan serta tempat lokalisasi prostitusi yang berada di daerah Panjang Kecamatan Way Lunik.

4. Metode Analisa Data Kualitatif

Setelah data terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk di analisa. Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisa kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian di pisah-pisahkan menurut kategori untuk di ambil suatu kesimpulan.

Meleong mengutip Bogdan dan Biklen bahwasannya mendefinisikan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

¹⁵Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*....., h. 280

Dalam menarik kesimpulan analisis data akhir penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dari analisa dan kesimpulan tersebut dapat terjawab pokok dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.¹⁶



¹⁶Ibid, h. 123

BAB II

KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN TERHADAP MASALAH SOSIAL

A. Teori Perwakilan Menurut Para Ahli

Menurut Arendt Lipjhart, Unsur dari suatu negara demokrasi adalah adanya badan perwakilan rakyat, karena rakyat tidak dapat memerintah atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya secara sendiri-sendiri, karenanya harus diwakilkan. Sesuai dengan hal tersebut lembaga perwakilan tersebut banyak dibentuk di negara-negara yang ada di dunia saat ini, sebagai perwujudan demokrasi attau kedaulatan rakyat.¹⁷

Menurut International Commision Of Jurist, Merumuskan sistem politik yang demokratis sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui pemilihan umum.

Menurut Hanna Penichel Pitkin, Perwakilan politik di maksudnya sebagai “ proses mewakili dimana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan terwakil. Walau wakil bertindak secara bebas tapi harus bijaksana dan penuh pertimbangan serta tidak sekedar melayani, wakil

¹⁷ Indra J. Piliang, *Mengenal Teori-Teori Politik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), h. 101

bertindak sedemikian rupa sehingga diantara dia dengan terwakil tidak terjadi konflik dan jika terjadi penjelasan harus mampu meredakannya.¹⁸

a. Konsep Perwakilan

Menurut Heinz Ealau, secara prinsip wakil tentulah melihat dirinya sebagai mewakili warga negara yang berada di dalam batas lingkup perwakilan secara keseluruhan. Maka dari itu para wakil disebut juga wakil rakyat. Ada tiga kemungkinan yang bisa dimanfaatkan wakil untuk memusatkan perhatiannya terhadap terwakil, yaitu memberikan perhatiannya terhadap kelompok, memperhatikan partai, serta memperhatikan wilayah atau daerah yang dipilih (Dapil). Setiap wakil tentulah mempunyai kemampuan dan keahlian yang diperkirakan atau diharapkan dapat memanfaatkan untuk melayani tugas perwakilan.

b. Teori-teori Perwakilan

i. Teori Mandat

Yaitu Seorang wakil dianggap duduk di lembaga Perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Yang memberikan teori ini dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Teori mandat ini dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :¹⁹

- 1) Mandat Imperatif, menurut teori ini bahwa seorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah (intruksi) yang diberikan oleh yang diwakilinya. Si wakil tidak boleh bertindak di luar perintah, sedangkan kalau ada hal-hal atau

¹⁸ Ibid, h. 103

¹⁹ Ibid, h. 109

masalah/persoalan baru yang tidak terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat perintah baru dari yang diwakilinya. Dengan demikian berarti akan menghambat tugas perwakilan tersebut, akibatnya lahir teori mandat baru yang disebut mandat bebas.

- 2) Mandat Bebas, teori ini berpendapat bahwa sang wakil dapat bertindak tanpa tergantung pada perintah (intruksi) dari yang diwakilinya. Menurut teori ini sang wakil adalah merupakan orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya. Ajaran ini dipelopori oleh Abbe Sieyes di Perancis dan Block Stone di Inggris. Dalam perkembangan selanjutnya teori ini berkembang menjadi teori Mandat Representatif.

- 3) Mandat Representative, teori ini mengatakan bahwa sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk minta pertanggungjawabannya. Yang bertanggung jawab justru adalah lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya.

ii. Teori Organ

Menurut Ajaran Von Gierke, Negara merupakan satu organisme yang memiliki alat-alat perlengkapan seperti : eksekutif, parlemen, dan rakyat, yang semuanya itu memiliki fungsinya masing-masing, namun antara satu dengan yang lainnya saling memiliki kepentingan. Menurut Jellinek, rakyat adalah organ primer (utama), tetapi organ ini tidak dapat menyatakan kehendaknya tanpa melalui organ sekunder, yaitu parlemen. Maka dari itu tidak perlu dipersoalkan hubungan antara sang wakil dengan yang diwakilinya dalam segi hukum.

iii. Teori Sosiologi

Menurut Rieker, ajaran ini menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan suatu bangunan politik tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Artinya bahwa lembaga perwakilan tercermin dari lapisan masyarakat yang ada.

iv. Teori Hukum Obyektif

Menurut Leon Duguit, hubungan antara rakyat atas dasarnya adalah solidaritas. Wakil-wakil rakyat dapat melaksanakan dan menjalankan tugas kenegaraannya atas nama rakyat dan sebaliknya, rakyat tidak dapat melaksanakan tugas kenegaraannya tanpa memberikan dukungan kepada wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah. Hukum obyektif inilah yang membentuk lembaga perwakilan yang menjadi satu bangunan hukum.

c. Tipe Perwakilan Berkaitan Dengan Partai Politik

Tipe perwakilan menurut Ramlan Surbakti, berkaitan dengan partai politik dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu :

- a. Suatu pandangan yang menyatakan wakil rakyat dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan program partai.
- b. Partai memiliki peran sebagai penghubung antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional. Dalam melaksanakan program partai maka wakil rakyat melaksanakan kepentingan nasional.
- c. Segala hal yang diperjuangkan oleh partai politik tidak selalu menyangkut kepentingan nasional, maka dari itu wakil rakyat yang terkait pada program partai hanya sebagian dan selebihnya ditentukan dengan pertimbangan untuk kepentingan nasional.
- d. Suatu pandangan yang membedakan perwakilan rakyat dari suatu kepentingan yang diperjuangkan oleh rakyat dan apa yang didahulukan apakah merupakan kepentingan daerah atau kepentingan nasional.

d. Sifat Lembaga Perwakilan

Seseorang yang duduk dalam lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum merupakan sifat perwakilan politik. Menurut Bintan R Saragih, adapun tugas dan fungsinya dalam suatu masyarakat yang bersangkutan menjadi anggota lembaga perwakilan tetap disebut sebagai perwakilan politik.

Menurut Eisinger, suatu pemahaman mengenai sistem perwakilan memberikan gambaran bahwa perwakilan individu harus memahami aspirasi, nilai, kepercayaan, dan sikap-sikap masyarakat. Maka dari itu sistem perwakilan seharusnya menjelaskan faktor-faktor berikut, yaitu :

- a. Karakteristik konstituen yang diwakili.
- b. Peran mereka.
- c. Hubungan mereka dengan konstituen.
- d. Persepsi mereka akan suara hati atau opini politik konstituen.

B. Teori Kepedulian

Kepedulian merupakan salah satu bentuk tindakan nyata, yang dilakukan oleh masyarakat dalam merespon suatu permasalahan. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kepedulian juga merupakan partisipasi yakni keikutsertaan, kepedulian juga merupakan sebuah sikap keterhubungan dengan manusia pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota manusia untuk membantu orang lain atau sesama.²⁰

Kata peduli memiliki makna yang beragam. Banyak literatur yang menggolongkannya berdasarkan orang yang peduli, orang yang dipedulikan dan sebagainya. Oleh karena itu kepedulian menyangkut tugas, peran, dan hubungan. Kata peduli juga berhubungan dengan pribadi, emosi dan kebutuhan.

²⁰W.J.S Poewadarmintra. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 143

Menurut Swanson, mendefinisikan kepedulian merupakan wujud nyata dari empati dan perhatian, secara garis besar merupakan tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok makhluk (dalam hal ini manusia) terhadap makhluk lainnya dalam sudut pandang bahwa makhluk yang mempedulikan melakukan berbagai upaya untuk mengubah keadaan makhluk yang dipedulikan dari keadaan semula kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Boyatzis dan McKee, kepedulian merupakan perasaan yang ditujukan kepada orang lain, ketika kita bersikap terbuka kepada orang lain, maka kita dapat menghadapi masa-masa sulit dengan kreativitas dan ketegaran. Empati mendorong kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Empati akan muncul ketika kita memulai rasa ingin tahu kita terhadap orang lain dan pengalaman pengalaman mereka. kemudian empati itu akan diwujudkan ke dalam bentuk tindakan. Kepedulian didasarkan pada hasrat secara penuh untuk membina ikatan dengan orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun bagaimanapun cara terbaik untuk memahami apa itu kepedulian adalah dengan cara melihat bagaimana kepedulian tersebut dipraktikan. Kepedulian juga dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang memiliki tiga komponen, yaitu :²¹

1. Pemahaman dan empati kepada perasaan dan pengalaman orang lain
2. Kesadaran kepada orang lain

²¹<https://anwarabdi.wordpress.com/tag/manusia-sebagai-makhluk-sosial/>

3. Kemampuan untuk bertindak berdasarkan perasaan tersebut dengan perhatian dan empati.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain, atau dapat disebut sebagai makhluk sosial. Setiap manusia pasti mempunyai kepentingan, dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga akan tercipta interaksi antar keduanya. Oleh sebab itu kepedulian merupakan sikap peduli atau cara seseorang memperlakukan hubungan dengan orang lain yang bermula dari perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan seperti memperhatikan orang lain, belas kasih, dan menolong apa yang ada dilingkungan masyarakat atau kepentingan umum disekitarnya.

1. Bentuk-bentuk Kepedulian

Menurut Wardhani, bentuk-bentuk kepedulian diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan berupa sandang, pangan dan kesehatan

Bantuan berupa sandang, pangan dan kesehatan yang diberikan kepada mereka menyangkut kebutuhan sehari-hari seperti memberi bantuan berupa pakaian, perlengkapan sholat, makanan kepada mereka yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan, perkembangan fisik, jiwa dan fikiran anak-anak panti asuhan. Sedangkan bantuan yang diberikan dalam bidang kesehatan seperti

memberikan bantuan uang untuk berobat ketika anak panti asuhan sakit.

b. Memberikan perhatian dan kasih sayang

Sebagaimana layaknya orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak kandungnya, umat islam juga perlu memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak dialam panti asuhan. Mereka yang telah kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orang tua tentu sangat membutuhkan perhatian dari orang lain meski tidak sama nilainya. Perhatian dan kasih sayang ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan jiwa raga mereka. Hal ini agar membuat mereka tegar menerima kenyataan hidup dan bersemangat menggapai masa depan. Oleh sebab itu mereka perlu diperlakukan dengan baik dan lemah lembut.

c. Membiayai pendidikan

Berbuat baik terhadap anak-anak yang hidup dipanti asuhan dengan cara membiayai pendidikannya adalah tindakan yang sangat mulia, sehingga diharapkan mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, baik dan juga sholeh. Pendidikan dan pengajaran berperan penting sebagai dasar pengetahuan baik akhlak, etika dan juga moral bagi anak, hal tersebut memang sangat menjadi anjuran oleh Allah dan juga Rasulullah untuk memberikan yang terbaik bagi mereka.

2. Jenis-jenis Kepedulian

Kepedulian sosial dikategorikan dalam 3 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Kepedulian suka maupun duka yaitu kepedulian yang timbul tanpa membedakan situasi baik dalam situasi suka maupun duka, turuntuk merasakan apa yang dirasakan orang lain.
- b. Kepedulian pribadi dan bersama yaitu kepedulian yang timbul karena gerak hati yang sifatnya pribadi namun juga disaat kepedulian harus dilakukan bersama dan kegiatannya berkelanjutan.
- c. Kepedulian yang mendesak yaitu kepedulian yang bersifat kepentingan bersama dan harus diutamakan.

3. Dimensi Kepedulian

a. Mengetahui

Berusaha keras memahami kejadian-kejadian yang memiliki makna dalam kehidupan orang lain. Pada aspek ini menghindari asumsi tentang kejadian yang dialami orang lain sangat penting, berpusat pada kebutuhan orang lain, melakukan penilaian yang mendalam, mencari syarat verbal dan non verbal, dan terlibat pada kedua isyarat tersebut.

b. Turut Hadir

Hadir secara emosi dengan menyampaikan ketersediaan, berbagai perasaan, dan mamantau apakah orang lain terganggu atau tiak terganggu dengan emosi yan diberikan.

c. Melakukan

Melakukan sesuatu bagi orang lain, seperti melakukannya untuk diri sendiri, apabila memungkinkan, seperti menghibur, melindungi, dan mendahulukan, seperti melakukan tugas-tugas dengan penuh keahlian dan kemampuan saat mempertahankan martabat.

d. Memungkinkan

Memfasilitasi perjalanan hidup dan kejadian yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain dengan memberikan informasi, memberikan penjelasan, memberikan dukungan, fokus pada perhatian yang sesuai, dan memberikan alternatif.

e. Mempertahankan

Keyakinan mendukung keyakinan orang lain akan kemampuannya menjalani kejadian atau masa transisi dalam kehidupan dan menghadapi masa yang Legislatif.

C. Fraksi dan alat-alat kelengkapan DPR

Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPR yang terdiri dari kekuatan sosial politik dan mencerminkan susunan anggota dalam masyarakat. Fraksi memiliki tugas dalam menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang menyangkut urusan tiap-tiap fraksi, meningkatkan kemampuan efektivitas dan efisiensi kerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR. Adapun alat-alat kelengkapan DPR, yaitu: pertama, pimpinan DPR yang

terdiri atas seorang ketua dan beberapa wakil yang terpilih diantara anggota DPR tersebut. Kedua, komisi-komisi mengelompokkan anggota DPR dari bidang keahlian dan tugas yang ditetapkan dengan surat keputusan. Tugas komisi meliputi beberapa bidang dalam membentuk perundang-undangan dan APBN, mengawasi badan eksekutif, dan menampung aspirasi masyarakat.

Ketiga, badan kehormatan sebagai alat kelengkapan DPR yang berpotensi memperbaiki perilaku menyimpang dari anggota DPR. Keempat, badan musyawarah yang bertugas menetapkan acara-acara DPR dalam satu tahun atau masa persidangan yang memberikan pertimbangan kepada pimpinan, menetapkan pokok-pokok kebijakan dan tugas lain yang diserahkan. Kelima, badan urusan rumah tangga merupakan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap fraksi. Keenam, badan kerja sama antar parlemen merupakan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap fraksi dan ditetapkan setiap permulaan tahun sidang.

Ketujuh, panitia suatu panitia khusus yang dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR, sedangkan panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR disebut panitia kerja. Tugas panitia khusus ialah melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat dibubarkan setelah jangka waktu tugas dinyatakan selesai. Panitia kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dan

jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR dan dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir dan tugasnya dinyatakan selesai.

1. Definisi Anggota Legislatif

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah DPRD diatur dengan pasal 342 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD yang menyebutkan bahwa : “DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota”.

Legislator merupakan tokoh masyarakat yang diamanatkan oleh rakyat perorangan untuk membuat perlindungan politik terhadapnya. Legislator ini bertindak sebagai penyampai aspirasi/kepentingan dari rakyat kepada sang penguasa. Begitu beratnya tugas legislator, maka ia adalah seseorang yang “mahatahu” dan pembentuk dasar hukum untuk negara yang bersangkutan.

Legislatif yaitu lembaganya yang didalamnya adalah Legislator, yang membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun dia berada yang dipilih melalui pemilihan umum. Menurut Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu

Politik badan legislatif adalah lembaga yang "LEGISLATIF" atau membuat Undang-Undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nama lain yang sering dipakai adalah parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (public policy) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Dapat dikatakan bahwa badan legislatif merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa legislatif adalah lembaga yang membuat kebijakan atau undang-undang yang merupakan badan pembuat keputusan menyangkut kepentingan umum dan dalam hal ini legislatif di daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Hak dan kewajiban Badan Legislatif menurut UUD 1945

- a. Hak Petisi (untuk mengajukan pertanyaan bagi setiap anggota).
- b. Hak Budget (untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara/Daerah).
- c. Hak Interpretasi (untuk meminta keterangan terutama pada eksekutif).
- d. Hak Amandemen (untuk mengadakan perubahan peraturan).

- e. Hak Angket (untuk mengadakan penyelidikan karena diduga terlibat kasus).
- f. Hak Inisiatif (untuk mengajukan rancangan undang-undang).
- g. Hak Prakarsa.
- h. Hak untuk mengajukan pernyataan pendapat.

3. Fungsi Anggota Legislatif

- a. Legislasi, berkaitan dengan kebijakan dan pembentukan Peraturan Daerah. Untuk itu DPRD diberikan inisiatif, hak amandemen dan hak budget.
- b. Melakukan pengawasan terhadap eksekutif supaya tindakan eksekutif sesuai dengan kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk itu DPRD diberi hak bertanya, hak interpelasi, hak angket dan mosi.
- c. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah.

4. Tugas dan Wewenang Anggota Legislatif

- a. Membentuk peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBN) yang diajukan oleh Kepala Daerah.

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan : Peraturan Daerah dan APBN.
- d. Mengusulkan pendapat.

D. Teori Masalah-masalah Sosial

Banyak para ahli yang telah mencoba untuk mendefinisikan masalah-masalah sosial, yang pada dasarnya mengarahkan perhatiannya pada kondisi ketidakseimbangan perilaku, moral, dan nilai-nilai sosial. Hal ini diartikan sebagai suatu kehidupan masyarakat yang sebelumnya normal menjadi terganggu, sebagai akibat dari perubahan pada unsur-unsur dan kepentingan manusia dalam masyarakat.²²

Menurut pendapat Daljuni tentang masalah sosial adalah suatu kesulitan atau ketimpangan yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri dan membutuhkan pemecahan dengan segera dan sementara itu orang masih percaya akan masih dapatnya masalah itu dipecahkan. Arti bersumber dari dalam masyarakat sendiri adalah bahwa masalah tersebut munculnya sebagian dari sistem kemana masyarakat biasanya berorientasi. Masalah sosial itu berkisar dari suatu keadaan ketidakseimbangan antara unsur nilai-nilai dan norma-normasosial dalam masyarakat yang relatif membahayakan atau menghambat anggota-anggota masyarakat dalam usahanya mencapai tujuan.

²²Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2009), h.146

1. Timbulnya Masalah-masalah Sosial

Dalam hal ini ada empat sumber timbulnya masalah sosial antara lain:²³

- a. Faktor ekonomi terdapat masalah kemiskinan, yang dalam hal ini kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan absolut.
- b. Faktor biologis yang didalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah endemis atau penyakit menular sebagaimana terjadi dewasa ini, yaitu kasus flu burung, virus SARS, HIV, dan penyakit kelamin yang menyerang di beberapa daerah.
- c. Faktor psikologis seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, dan sebagainya.
- d. Faktor sosial dan kebudayaan seperti perceraian, masalah kriminal, pelecehan seksual, prostitusi, kenakalan remaja, konflik ras, krisis moneter, dan sebagainya.

Ada beberapa masalah sosial utama yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut :²⁴

a. Masalah Kriminalitas.

Ialah, suatu tindakan yang dilakukan individu atau kelompok yang melanggar hukum, merupakan suatu tindakan dengan kejahatan yang mengganggu keseimbangan sosial bagi masyarakat. Seperti, pelecehan seksual, pembunuhan, dan sebagainya.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 217

²⁴ Ibid. h. 97

b. Masalah Kependudukan.

Ialah, masalah yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas. Seperti, persebaran penduduk yang tidak merata, jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kualitas penduduk yang rendah, tingginya tingkat ketergantungan, dan kepadatan penduduk.

c. Masalah Kemiskinan.

Ialah, keadaan suatu individu atau kelompok yang dimana tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti, sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh masalah kependudukan dimana banyaknya jumlah penduduk namun dengan kualitas penduduk yang rendah, sehingga tidak mampu bersaing dengan penduduk lainnya. Selain itu juga masalah sosial kemiskinan ini dapat meningkatkan masalah sosial kriminalitas yang dimanfaatkan sebagai sarana pendapatan dan meningkatkan perekonomian.

d. Masalah Lingkungan Hidup.

Ialah, keadaan lingkungan yang kurang layak seperti lingkungan yang berada disekitar pabrik dimana lingkungan tersebut akan terkena dampak dari limbah pabrik yang ada serta perilaku atas manusia itu sendiri. Keadaan lingkungan yang tidak baik juga akan memberikan dampak terhadap fisik biologis ataupun sosial seseorang.

e. Masalah Prostitusi (pelacuran).

Ialah, seseorang yang melakukan bisnis penyediaan jasa seksual, masalah sosial ini dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan moral, dan agama, sehingga hal yang tidak baik dan melanggar norma dapat dihalalkan sebagai ladang usaha. Selain itu faktor ekonomi merupakan dorongan utama seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut, dengan sulitnya pencarian lapangan pekerjaan dan ijazah alakadarnya yang mereka miliki, maka mereka lebih memilih untuk menjadi seorang pekerja seksual.

Masalah sosial yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini yaitu masalah prostitusi, khususnya masalah prostitusi yang terjadi diekslokalisasi kelurahan way lunik kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

2. Masalah Prostitusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Prostitusi*” mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal mana pihak lelaki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan pihak perempuan, biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel dan tempat lainnya sesuai kesepakatan. Secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Prostitute /prostitution*” yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang. Sedangkan dalam realita saat ini,

menurut kaca mata orangawam prostitusi diartikan sebagai suatu perbuatan menjual diri dengan memberikenikmatan seksual pada kaum laki-laki.²⁵

Kartini Kartono, mendefinisikan prostitusi atau pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks, dengan imbalan pembayaran. Soerjono Soekanto, mengatakan prostitusi atau pelacuran merupakan suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah.

Menurut Koentjoro dan Sugihastuti,²⁶ bahwa pelacuran adalah orang yang melacurkan diri atau menjual diri. Istilah pelacur dianggapnya lebih tepat dibandingkan dengan Wanita Tuna Susila (WTS) dan Pekerja Seks Komersil (PSK), karena : Istilah pelacur sudah biasa di dengar di masyarakat, sehingga dapat digunakan untuk laki-laki dan perempuan yang melacurkan diri; Arti pelacur baik secara denotatif dan konotatif lebih lengkap dan spesifik dan dapat memberikan makna ganda; Tidak semua pelacur adalah pekerja seks; Istilah pekerja seks dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa melacur merupakan pekerjaan. Tidak hanya itu, PSK juga dipandang sebagai

²⁵Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Gita Media Pers, 2016), h. 386

²⁶Lestari, R. dan Koentjoro. 2002. *Pelatihan berpikir optimis untuk meningkatkan harga diri pelacur yang tinggal dipantai dan luar pantai sosial*. Jurnal ilmiah berkala psikologi indigenous, (vol 6, no 2, 2002), h. 112 .

problem seksual karena pelampiasan nafsu seks terhadap lawan jenis yang tidak terkendali.

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prostitusi/pelacuran adalah suatu perilaku seks yang menyimpang dimana wanita lah yang menjadi obyek, baik wanita dewasa maupun anak-anak yang menjual tubuhnya kekaum laki-laki untuk mendapatkan upah/bayaran.

3. Teori Dramaturgi

Teori dramaturgi dikembangkan oleh Erving Goffman. Ia dilahirkan di Manville Albert Canada pada 11 Juni 1922 dan meninggal pada 19 November 1982. Dalam teori dramaturgi ini memberikan penjelasan logis untuk memahami motif tindakan manusia, atau kenapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan karena dalam kehidupan manusia seperti peran aktor dalam drama yang dipentaskan, dimana tindakan yang dilakukan dipanggung depan dan dipanggung belakang bisa saja tidak sama dan bahkan jauh berbeda. Hidup adalah drama. Baik buruknya peran, tergantung kepada komitmen dalam masing-masing aktor. Kondisi seperti ini di gambarkan dalam kehidupan para PSK. Ia harus menutupi jati dirinya demi sebuah pementasan bernama “pekerja pramunikmat”. Kehidupan para PSK akan menarik jika dipotret dengan teori dramaturgi Erving Goffman. Dramaturgi sangat penting sebagai

upaya mematangkan wawasan, intelektualitas, dan mematangkan emosi sebagai bekal di atas panggung kehidupan para PSK.²⁷

Menurut Goffman, teori dramaturgi ini dibedakan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah panggung depan (front stage), yang dimaksud dengan panggung depan yaitu seseorang memainkan peran yang bukan asli di hadapan seseorang. Bagian yang kedua adalah panggung belakang (back stage), maksudnya yaitu yang dapat mengetahui kehidupan sosial sesungguhnya adalah dirinya sendiri bukan orang lain. Selanjutnya Goffman membagi front personal menjadi dua yaitu penampilan dan gaya. Penampilan adalah berbagai jenis barang yang mengenalkan kepada kita mengenai status sosial aktor, sementara gaya berfungsi sebagai mengenalkan kepada penonton mengenai peran macam apa yang diharapkan aktor untuk memainkan dalam situasi tertentu. Gambaran yang dapat disimpulkan dari teori Goffman adalah bahwa selalu ada tindakan-tindakan imitasi yang diperkenankan oleh sang aktor di dalam interaksinya dengan individu lainnya.²⁸

a. Jenis prostitusi menurut tempat penggolongan atau lokalisasinya, yaitu:

- 1) Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Seperti lokalisasi Silir di Solo dan Gang Dolly di Surabaya. Meskipun lokalisasi ini sudah tidak ada

²⁷Nur Syam, *Agama Pelacur: Dramaturgi trasendental*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), h. 3

²⁸ Ibid.

namun para pelacur masih beroperasi yaitu di pinggir jalan, hek malam dan mereka merupakan pelacur kelas bawah yang bekerja sama dengan sopir becak dan para pedagang.

2) Rumah-rumah panggilan, rumah-rumah panggilan ini memiliki ciri khusus dimana hanya pihak yang terkait saja yang mengetahuinya. Selain itu kegiatannyapun lebih terorganisir dan tertutup.

3) Dibalik front organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat (salon kecantikan, tempat pijat, rumah makan, warnet, warung remang-remang, dll). Disini sudah memiliki jaringan yang baik dan terorganisir. Tidak sedikit yang melibatkan orang-orang terhormat maupun pihak keamanan yaitu polisi.²⁹

Dari bentuk-bentuk prostitusi diatas prostitusi dikalangan anak-anak dewasa-maupun ibu-ibu ini termasuk dalam prostitusi yang tidak terdaftar (illegal), karena dilakukan secara diam-diam dan tertutup tidak ada campur tangan dari pihak departemen sosial dan kepolisian.

b. Tinjauan Kategori Prostitusi atau Pelacuran

Menurut Kartini Kartono, ada beberapa orang yang termasuk kategori pelacuran atau prostitusi yaitu :³⁰

²⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, diunduh tanggal 17 April 2019.

³⁰Rudy Gunawan F.X, Pelacur di Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 2007), h. 127

- 1) Penggundikan yaitu pemeliharaan istri tidak resmi, istri gelap atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan.
- 2) Tante girang yaitu wanita yang sudah menikah, namun tetap melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain, untuk mengisi waktu kosong dan bersenang-senang dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lain.
- 3) Gadis-gadis bar yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar dan sekaligus bersedia memberikan layanan seks kepada para pengunjung.
- 4) Gadis-gadis bebas yaitu gadis-gadis yang masih sekolah atau putus sekolah, putus studi akademik atau fakultas, yang mempunyai pendirian yang tidak baik dan menyebarkan kebebasan seks untuk mendapatkan uang dan kepuasan seksual.
- 5) Gadis-gadis panggilan adalah gadis-gadis dan wanita-wanita yang biasa menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai pelacur, melalui penyaluran tertentu.
- 6) Promisikuitas inilah hubungan seks secara bebas dengan pria manapun juga atau dilakukan dengan banyak laki-laki.

c. Kategori pelacur dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :³¹

³¹ Dr. Kiki Muhammad Hakiki, *Religi Pekerja Seks Komersial (PSK)*, (Bandar Lampung : Hak Cipta, 2016), h. 81

- 1) Mereka yang melakukan profesinya dengan sadar dan suka rela berdasarkan motivasi-motivasi tertentu.
- 2) Individu yang melakukan tugas melacur karena ditawan atau dijebak dan dipaksa oleh geromo-geromo yang terdiri atas penjahat-penjahat, calo-calo, dan anggota-anggota organisasi gelap penjual wanita dan pengusaha bordil. Akibat bujukan dan janji-janji manis, ratusan bahkan ribuan gadis-gadis cantik dipikat dengan janji akan mendapatkan pekerjaan terhormat dengan gaji besar. Namun pada akhirnya, mereka dimasukkan ke dalam rumah-rumah pelacuran yang dijaga dengan ketat, secara paksa, kejam, dan sadistik, dengan pukulan serta hantaman yang tidak berperikemanusiaan.

Dari tinjauan berdasarkan kategori prostitusi diatas, maka prostitusi yang terjadi di kalangan wanita panjang disini yaitu termasuk kategori wanita-wanita bebas. Alasan prostitusi ini termasuk prostitusi wanita-wanita bebas adalah dimana para wanita atau gadis-gadis ini memiliki latar belakang yang tidak baik karena faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, dan tututan lainnya. Selain itu juga mereka akan melakukan seks dengan para pria manapun yang mereka kehendaki untuk memuaskan nafsu para lelaki hidung belang yang biasanya sudah beristri.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam kepustakaan yang membahas tentang Kepedulian Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Masalah Sosial (Studi di Bekas Lokalisasi Panjang) Bandar Lampung, pernah ditulis dalam suatu penelitian atau merupakan bagian dari penelitian atau tulisan sebagaimana dalam beberapa tulisan sebagai berikut :

Karya ilmiah yang berjudul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANTAN PSK (PEKERJA SEKS KOMERSIAL) YANG TELAH BERKELUARGA (Studi di Kampung Rawa Laut Kelurahan Panjang Selatan Kota Bandar Lampung)**, karya Elvita Sofianti, Universitas Lampung tahun 2016, karya ini terfokus pada persepsi masyarakat terhadap mantan PSK.

Jika dilihat dari judul diatas ada sedikit persamaan dengan judul penelitian saat ini, yaitu membahas tentang prostitusi dan tuna susila, perbedaannya jika judul diatas membahas tentang Persepsi Terhadap Mantan PSK, sedangkan judul penelitian saat ini membahas tentang Kepedulian Anggota Legislatif Terhadap Masalah Sosial Studi di Bekas Lokalisasi Panjang) Bandar Lampung.

Karya ilmiah yang berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI LINGKUNGAN II KELURAHAN GEDUNG MENENG BARU BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015”**, karya Siti Maya Sari, Universitas Lampung tahun 2016,

karya ini terfokus pada partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif di lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015.

Jika di lihat dari judul diatas ada sedikit persamaan dengan judul penelitian saat ini, yaitu membahas tentang Anggota Legislatif Perempuan, perbedaannya jika judul diatas membahas tentang Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif , sedangkan judul penelitian saat ini membahas tentang Kepedulian Anggota Legislatif Terhadap Masalah Sosial Studi di Bekas Lokalisasi Panjang Kota Bandar Lampung.



BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN PANJANG DAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Profil Kecamatan Panjang

Sejak terbentuknya Kecamatan Panjang dari tahun 1976 sampai saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian Camat Panjang secara berturut-turut antara lain :

Tabel 3.1
Daftar Camat Kecamatan Panjang

No	Nama	Tahun
1	Fayakun	1976 – 1977
2	Sumariyadi, SH	1977 – 1977
3	Muchtar Abdullah, BA	1978 – 1981
4	Drs. Habiburrahman	1981 – 1983
5	Kardinal, BA	1983 – 1985
6	H. A Fuad Iba, BA	1985 – 1992
7	Darwin Djafri, SH	1992 – 1995
8	Drs. Idrus Efendi	1995 – 1995
9	Syamsuddin Yusuf	1995 – 1998
10	Sam'un, SH	1998 – 2000
11	Drs. Ramlan Amron	2000 – 2001
12	Sumarno, SH	2001 – 2003
13	Drs. Emil Riady	2003 – 2005
14	Drs. Junaidi	2005 – 2007
15	Paryanto, SIP	2007 – 2009
16	Bahirumsyah, S.Sos	2009 – 2011
17	Drs. Rahmad Indra Putra	2011 – 2012
18	Herni Musfi, S.Sos	2012 – 2016
19	Ahmad Nurizki E, S.STP	2017 – sekarang

Sumber Data: Dokumentasi Kecamatan Panjang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Panjang berasal dari

sebagian wilayah geografis dan administrasi Kecamatan Panjang dan Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bumi Waras.³²

1. Topografi Kecamatan Panjang

Kecamatan Panjang secara Topografi sebagai daerahnya adalah dataran rendah, pantai, dan sebagian daerah perbukitan. Pada Kecamatan Panjang terdapat perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi selain itu juga terdapat 2 pelabuhan yang ada di Kecamatan Panjang, yakni pelabuhan Panjang yang merupakan pelabuhan internasional dan terbesar di Lampung dan pelabuhan Srengsem yang merupakan pelabuhan untuk lalu lintas batubara yang berasal dari Sumatra Selatan ke Pulau Jawa.³³

2. Administrasi Pemerintahan Kecamatan Panjang

Pemerintahan Kecamatan Panjang terbentuk sejak Tahun 1976, berada pada Provinsi Lampung berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1994, Tahun 2012, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan

³²Dokumentasi, Profil Kecamatan Panjang

³³Ibid.

Kelurahan dan Kecamatan, wilayah Kecamatan Panjang dibagi menjadi 8 (deapan) Kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Srengsem.
- b. Kelurahan Karang Maritim.
- c. Kelurahan Panjang Selatan.
- d. Kelurahan Panjang Utara.
- e. Kelurahan Pidada.
- f. Kelurahan Way Lunik.
- g. Kelurahan Ketapang.
- h. Kelurahan Ketapang Kuala

Adapun pusat Pemerintahan Kecamatan Panjang berada di Kelurahan Karang Maritim. Kemudian untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31 Tahun 2008, tanggal 11 Februari 2008, tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Panjang Bandar Lampung.³⁴

3. Visi dan Missi Kecamatan Panjang

Terwujudnya kesejahteraan dan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, serta administrasi tata pemerintahan kelurahan yang baik dalam rangka

³⁴Ibid.

mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan upaya kebersihan lingkungan.
- d. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan program kerja dan kebijakan teknis baik bidang pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- e. Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan menerapkan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.³⁵

Adapun susunan organisasi dan tata kerja wilayah Kecamatan Panjang adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. Kepala Seksi Pemerintah
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Kepala Seksi Pembangunan

³⁵Ibid. h. 163

- f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum
- h. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- i. Kasubag Keuangan dan Perencanaan

4. Data Penduduk Kecamatan Panjang

Tabel 3.2
Data Penduduk Kecamatan Panjang
Tahun 2018-2019

NO	KELURAHAN	LUAS	JUMLAH				PENDUDUK		Jumlah
			LK	RT	KK	JIWA	LK	PR	
1	Srengsem	566.5	2	21	1.951	7.534	3.784	3.750	7.534
2	KR. Maritim	100	3	27	2.520	8.986	4.646	4.340	8.986
3	P. Selatan	111	3	37	2.976	11.894	5.766	6.128	11.894
4	P. Utara	221.5	3	19	3.018	11.777	5.846	5.931	11.777
5	Pidada	256	3	41	2.770	11.659	5.965	5.694	11.659
6	Way Lunik	144	2	32	2.015	7.782	3.768	4.014	7.782
7	Ketapang	224	2	8	809	3.300	1.664	1.636	3.300
8	Ketapang Kuala	115	2	7	656	2.751	1.385	1.366	2.751
Jumlah		1.741	20	225	16.715	65.683	65.683	32.859	65.683

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Panjang

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Panjang tahun 2018-2019 yang paling banyak penduduknya ada di Kecamatan Panjang Selatan dengan jumlah penduduk 11.894 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu di Kecamatan Ketapang Kuala yang jumlah penduduknya 2.751 jiwa. Dan jumlah penduduk di Kelurahan Way Lunik memiliki 8 RT dan ada 5 gang. Penduduknya yang paling banyak berada di RT

No. 28 berjumlah 182 jiwa, sedangkan penduduknya yang paling sedikit ada di RT No. 32 berjumlah sekitar 87 jiwa, mengapa demikian? karena penduduk yang berada Kelurahan Way Lunik ini sebagian penduduknya dari luar kota Bandar Lampung (pendatang) yang tidak memiliki surat pindah dari kota asalnya maka dari itu tidak terdaftar atau tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) ada sekitar 80 jiwa. Informasi tersebut diperoleh dari data, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Data Penduduk Kelurahan Way Lunik
Tahun 2018-2019

No	Kelurahan Way Lunik					
	Luas: 144					
	LK	RT	KK	JIWA	Penduduk	
					Lk	Pr
1	2	25	24	80	32	48
2		26	36	155	73	82
3		27	32	126	58	68
4		28	37	182	94	88
5		29	30	142	66	76
6		30	39	179	90	89
7		31	37	160	87	73
8		32	25	87	45	42
Jumlah	2	8	260	1.111	545	1.112

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Panjang

Way Lunik merupakan salah satu ekslokalisasi yang terdapat di kecamatan Panjang, di kelurahan way lunik memiliki 5 gang, berdasarkan informasi yang didapatkan dari 5 gang tersebut 3 gang merupakan tempat dimana terjadinya bisnis prostitusi, dan 2 lainnya tidak. Berdasarkan sumber informasi yang diperoleh juga bahwa dari 8 RT yang ada di kelurahan way lunik hanya 3 RT yang penduduknya

bukan merupakan pekerja seksual, yaitu RT 28 yang diketuai oleh bapak Nur Salim, RT 30 yang diketuai oleh bapak Safe'i, dan RT 31 yang diketuai oleh bapak Holkon, selain 3 RT tersebut terdapat penduduknya yang merupakan pekerja seksual.

Tabel 3.4
Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Kelurahan Way Lunik
Tahun 2018-2019

No	Pekerjaan	Lk	Pr	Jumlah Pekerja
1	PNS	32	19	51
2	TNI	12	0	12
3	Dagang	135	98	233
4	Tani	45	32	77
5	Tukang	59	0	59
6	Buruh	150	103	253
7	Pensiunan	34	17	51
8	Lain – lain	119	97	216
9	Anak Buah (PSK)	0	159	159
Jumlah Penduduk		586	525	1.111

Sumber : Data dari BPS (Kelurahan Way Lunik)

Dari data table diatasbisa dilihat dari penduduk Kelurahan Way Lunik tersebut memiliki pekerjaan yang bervariasi dengan jumlah PNS : 50 orang , TNI 12 orang, dagang 233 Orang, tani 77 orang, tukang 59 orang, buruh 253 orang, pensiunan 51 orang, lain-lainnya 216 orang, anak buah (PSK) sekitar 159 orang . Adapun yang menjadi sorotan yang khusus dalam masalah skripsi ini yaitu pekerjaan sebagai anak buah (PSK), maksudnya dengan kata lain “anak buah” adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai Pekerja Seks Komersial dengan menjualkan diri mereka untuk mendapatkan uang.

B. Sejarah Lokalisasi Kecamatan Panjang

Daerah Panjang Selatan, adalah daerah Pelabuhan Panjang hingga saat ini tercatat sebagai pelabuhan yang tetap menjadi eks lokalisasi di Indonesia. Pelabuhan Panjang yang berada di Bandar Lampung itu sendiri yang biasa dikenal dengan sebutan PMD (Pemandangan). PMD yang bertempat dikampung Rawa Laut, kelurahan Panjang Selatan itu terkenal sebagai kampung eks lokalisasi di kota Bandar Lampung, mengingat sebelum era kepemimpinan Wali Kota Bandar Lampung Nurdin Muhayat, kawasan tersebut pernah dilegalkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai salah satu perkampungan lokalisasi (selain lokalisasi Pemandangan di Way Lunik, Teluk Betung Selatan).

Perda Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Bandar Lampung menjadikan dua kawasan lokalisasi itu harus ditutup secara resmi. Meskipun secara resmi sesuai dengan perda 15 tahun 2002 lokalisasi tersebut sudah ditutup, ironisnya aktivitas di dalamnya terus berlangsung hingga kini. Setiap Pekerja Seks Komersial (PSK) ketika itu diberikan identitas kartu kuning oleh pemerintah, tetapi pada era Wali Kota Nurdin Muhayat sampai Wali Kota sekarang perkampungan ini tidak lagi mendapatkan dukungan dari pemerintah sebagai kawasan lokalisasi. Namun aktivitas perdagangan seks pun terus berlanjut, meskipun secara hukum kawasan tersebut telah dicabut status sebagai

lokalisasi resmi, namun seperti ada kesepakatan tak tertulis, untuk saling melindungi satu sama lainnya, sehingga suasana malam masih saja terus menyala dan membara hingga saat ini di kampung tersebut.

1. Kondisi Lingkungan Di Daerah Lokalisasi Panjang

Kawasan yang lebih dikenal dengan pemandangan dikelurahan Way Lunik itu adalah eks lokalisasi yang secara resmi telah ditutup bertahun-tahun lalu, namun aktivitas transaksi seks, diantaranya melibatkan pekerja seks anak –anak, remaja, dan ibu paruh baya masih terus berlangsung secara diam-diam di daerah sini. Dalam hitungan kaki melangkah dikawasan ini, antara satu rumah dengan rumah yang lainnya memiliki jarak yang sangat dekat. Hampir setiap rumah terpampang sebuah papan nama bertuliskan karaoke dan kafe, masing-masing telah diberi nama sesuai dengan keinginan sang pemilik rumah tersebut.

Suasana pada siang hari seperti layaknya dilingkungan masyarakat umumnya banyak anak-anak yang bermain, tetapi ada juga pada siang hari yang melakukan pekerjaan sebagai PSK hanya beberapa orang tidak begitu ramai, nanti selepas waktu Shalat Isya, mobil-mobil berangsur-angsur datang dikampung ini dan suasana malam akan semakin hidup, selayaknya diskotek. Masih ada beberapa rumah disini yang secara tegas menuliskan pada pintu rumahnya, seperti "Rumah Tangga" artinya yaitu rumah tersebut anggota

keluarganya tidak terlibat dalam perdagangan seks seperti kebanyakan rumah-rumah disekitarnya.

Ada salah satu warung digang tempat lokalisasi tersebut mengatakan “saya sudah tau mereka (PSK) disini melakukan hal seperti itu, sebenarnya saya gak mau kalo mereka ada disini tapi kalo hanya sekedar jajan ya gak papa lah” ujar ibu Tina. Ibu sebagai pemilik warung dan warga setempat yang sudah 18 tahun tinggal di daerah tempat lokalisasi prostitusi. Ibu dengan dua orang anak ini mengaku prihatin dengan keadaan seperti ini. “Anak saya titipkan di Jawa sama budenya. Ini yang masih SMP juga nanti mau saya suruh ke sana. Takut kalau di sini” ujarnya. “Sebenarnya waswas juga apalagi kalau petugas sedang masuk. Ya kalau bisa, sekarang pindah,” ujarnya kembali.

2. Kondisi Keagamaan di Daerah Lokalisasi Panjang

Bahwasannya masyarakat di lokalisasi Panjang masih melaksanakan kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan seminggu sekali pada hari rabu yang diikuti oleh masyarakat bertempat tinggal di 5 gang tersebut. Kegiatan pengajian ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta menambahkan wawasan ilmu tentang keagamaan. Di samping itu kegiatan pengajian ini diisi dengan kegiatan arisan. Kegiatan pengajian ini terfokus ada ibu-ibu lansia (lanjut usia) dan orang tua. Kenapa pengajian ini lebih diminati

oleh lansia ? “dikarenakan ibu-ibu yang masih muda dan anak remaja masih melakukan kegiatan prostitusi di siang hari demi memenuhi kebutuhan hidup mereka, Ada juga sebagian ibu-ibu yang mengikuti kegiatan pengajian yang kegiatan pengajian ini di pimpin oeh Ustazah Maymunah”.

Dari perbincangan hangat yang saya lakukan dengan Ustazah Maymunah selaku ketua pengajian menyarankan bahwasannya “agar mengajak kepada ibu-ibu untuk ikut mengikuti pengajian agar lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT” Kegiatan pengajian ini dilakukan di Masjid Abdurrahman. Pada bulan suci Ramadhan masyarakat, Ustd, tokoh masyarakat, Tokoh agama, beserta pamong desa (RT), sepakat atau menyetujui belangsungnya kegiatan prostitusi ini dibuka setelah sholat teraweh, adapun kegiatan prostitusi yang dilakukan sebelum sholat teraweh itu adalah oknum-oknum yang menyalahkan aturan yang di sepakati oleh masyarakat, demi keuntungan pribadinya. Kenapa masih ada yang melanggar aturan-aturan tersebut? “ Dikarenakan yang melakukan prostitusi itu bukan dari masyarakat panjang asli, melainkan dari masyarakat pendatang. Dari hasil Wawancara dengan RT 27 dengan Bpk. Deni “ ada juga sebagian PSK yang tidak melakukan pekerjaannya, ada juga mereka yang pulang kampung tempat tinggalnya”.Setelah bulan suci Ramadhan telah usai para PSK ini melakukan profesinya kembali seperti biasanya.

C. Profil Anggota Dewan Legislatif Perempuan DPRD Kota Bandar Lampung

1. HJ. WIWIK ANGGRAINI, SH

Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 14 juni 1963

Alamat : Jl. Nangka No 4. Sepang jaya

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Suami : Hi. Syafuddin Zukri

Pendidikan

- a. SDN 29 Tanjung Karang. Tamat Tahun 1975
- b. SMPN 3 Tanjung Karang Tamat Tahun 1979
- c. SMA Xaverius Tanjung karang. Tamat tahun 1982
- d. S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Tamat Tahun 1987

Daerah Pemilihan : Bandar Lampung 1 (satu)

Fraksi : PDIP

Komisi : III

Pengalaman Organisasi :

- a. Wakil Sekretaris eksternal Periode 2004-2009
- b. Wakil Ketua Bidang Kasra & Perempuan Periode 2010-2015

- c. GOPTKI Prov Lampung
- d. Ketua Majelis Ta'lim Al-Furqon, Sepang Jaya
- e. KPPI Kota Bandar Lampung
- f. Pengurus Gapensi Kota Bandar Lampung
- g. Bendahara Yayasan Andini Bandar Lampung

Pengalaman Kerja :

- a. Direktur CV. Ghono Dhio
- b. Karyawan Bumi Putra Syariah (1912)
- c. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, 2014 s/d 2019

2. SRI NINGSIH DJAMSARI, S.H

Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 16 oktober 1974

Alamat : Jl. Pulau Ambon Gria Sukarama 2 No. 41

B LK

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Suami : Bahrim Afandi

Pendidikan :

- a. SD MIN Pelita Sukarama I Tahun 1987
- b. SMPN 12 Tahun 1990
- c. SMA Utama 3. Tamat tahun 1993
- d. Universitas Saburai

Daerah Pemilihan : Bandar Lampung 2 (dua)

Fraksi : PDIP
 Komisi : II
 Pengalaman Kerja : Anggota DPRD Kota Bandar Lampung
 2014 s/d 2019

3. NANI MASYARI

Tempat, Tanggal Lahir : Sumber Agung, 31 Juli 1984

Alamat : Jl. Wan Abdurrahman LK II Sumber Agung

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan :

- a. SD N 2 Beringin Raya
- b. SLTP N 14 Bandar Lampung
- c. SMU Persada Bandar Lampung
- d. Master Komputer

Daerah Pemilihan : Bandar Lampung 6 (Enam)

Fraksi : Nasdem

Komisi : IV

Pengalaman Kerja : Anggota DPRD Kota Bandar
 Lampung 2014 s/d 2019

4. Hj. ERNITA, SH. MH

Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 14 April 1973

Alamat : Jl. Abdurahman No. 9 LK.1

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama suami : Hi. Ir. Yandri Nazir

Pendidikan :

- a. SDN 4 Suka Jawa 1986
- b. SMPN 4 Teluk Betung 1989
- c. SMAN 10 Pahoman 1992
- d. S2 Unila 2006

Daerah Pemilihan : Bandar Lampung 6 (enam)

Fraksi : Demokrat

Komisi : II

Pengalaman Organisasi :

- a. Ketua bid. IKAD Ekonomi Prov. Lampung 2004-2005
- b. Aggt. Bid. Sosial IKAD DPRD Prov. Lampung 2007-2009
- c. Sekretaris PDRI Kota Bandar Lampung 2009-2014
- d. Sekretaris umum HCMI Bandar Lampung 2004
- e. Sekretaris Hukum & ham DPC Demokrat B. Lampung 2004-2009
- f. Sekretaris Hukum & Advokasi IWAPI Bandar Lampung 2004-2009
- g. Bendahara DPC Partai Demokrat 2010-2011

Pengalaman Kerja :

- a. Direktur Utama PO. Bukit Barisan Group 1997-2009
- b. Direktur Utama CV. Yarenta Jaya Mandiri 2003-2009
- c. Direktur Utama PT. Bumi Andalas Mining Sejahtera Tahun 2002-2009
- d. Direktur Utama PT. Bumi A. Telecom 2002-2009
- e. Direktur Utama Yayasan Global English 2005-2007
- f. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung 2014 s/d 2019

5. PEBRIAN PISKA, SP.,MH

Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 29 Februari 1988

Alamat : Jl. RA. Basyid Sinar Semendo No.43

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama suami : Nisman Sumarto

Pendidikan :

a. SDN 1 Labuhan Dalam 2000

b. SLTP AL-Kautsar 2003

c. SMAN 12 B. Lampung 2006

d. Fakultas Pertanian Unila 2011

Daerah Pemilihan: Bandar Lampung 1 (satu)

Fraksi : Demokrat

Komisi : IV

Pengalaman Kerja : Anggota DPRD Kota Bandar Lampung
2014 s/d 2019.

6. ERIKA NOVALIA SANI

Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 16 November 1977

Alamat : Jl. RA. Basyid Sinar Semendo No. 43

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan :

- a. SDN 03 Bandar Lampung 1984-1989
- b. SMP 02 Bandar Lampung 1989-1992
- c. SMAN 05 Tanjung Karang 1992-1995
- d. Fakultas Hukum Unila 1995-1999

Daerah Pemilihan : Bandar Lampung 1 (satu)

Fraksi : Nasdem

Komisi : III

Pengalaman Kerja :

- a. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung 2014 s/d 2019
- b. Aktivis Perempuan Didamar, Pusdik
- c. Konsultan Word Bank 2001
- d. Perusahaan Vice Presiden PT. Aj Sequis Life



BAB IV

MASALAH SOSIAL PROSTITUSI ANALISIS ANGGOTA LEGISLATIF

PEREMPUAN KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Bentuk Kepedulian Anggota Legislatif Perempuan Dalam Mengatasi Masalah Sosial Prostitusi.

Anggota legislatif merupakan individu yang tergabung dalam suatu kelompok representasi dari rakyat Indonesia dimanapun keberadaannya yang dipilih melalui pemilihan umum, yang juga memiliki berbagai peran penting bagi masyarakat. Khususnya adalah anggota legislatif perempuan yang juga sangat dibutuhkan perannya dan kepeduliannya dalam mengatasi masalah sosial seperti masalah prostitusi, agar dapat menanggulangi dampak negatif kegiatan tersebut bagi masyarakat.

Dampak prostitusi dapat dirasakan oleh pelaku dan juga masyarakat. Dalam menangani masalah sosial yang terjadi di kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, dan untuk mengetahui bagaimana cara dan bentuk kepedulian anggota legislatif perempuan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anggota legislatif.

1. Pengetahuan anggota legislatif perempuan terhadap masalah sosial prostitusi di bekas lokasi kecamatan Panjang.

Anggota legislatif perempuan telah mengetahui bahwa terdapat masalah sosial prostitusi dibekas lokalisasi kecamatan Panjang, anggota legislatif perempuan telah melakukan beberapa upaya untuk menanganinya dengan memberikan anggaran khusus serta pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan dan Dinas Sosial yang berada dikecamatan Panjang yang turun secara langsung kelokasi ekslokalisasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Nani Mayasari sebagai anggota legislatif perempuan komisi IV.

“Komisi IV beranggotakan 11 orang, namun hanya terdiri dari 2 perempuan dan sisanya memang laki-laki tentunya sebagai anggota legislatif kami sudah berupaya untuk membantu walaupun secara tidak langsung terhadap masalah sosial prostitusi. Dalam penanganan ini Komisi IV dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dinas Sosial”.³⁶

Seperti yang telah dipaparkan Ibu Nani bahwa anggota legislatif juga memiliki peran dalam penanganan masalah sosial, namun pada penanganan masalah sosial ini anggota legislatif hanya membantu masyarakat dalam pembuatan Akte Kelahiran yang dibutuhkan oleh anak yang dihasilkan dari pekerjaan jasa seksual tersebut, agar anak tersebut dapat memperoleh hak pendidikan seperti anak-anak pada umumnya, hal tersebut dipaparkan oleh Ibu Pebriani Piska, bahwa:

“Komisi iv hanya membantu dengan menjembatani melalui Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dalam proses berlangsungnya pembuatan Akte Kelahiran untuk anak-anak mereka, agar anak-

³⁶Nani Mayasari, Anggota Legislatif Perempuan, dari Fraksi Nasdem Komisi IV, wawancara dengan penulis, Ruang Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, 17 September 2019

anak mereka juga bisa mendapatkan hak pendidikan seperti anak-anak lain pada umumnya”.³⁷

2. Anggota legislatif perempuan hanya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tidak adanya kepedulian khusus yang seharusnya dibangun oleh anggota legislatif perempuan terhadap masalah sosial prostitusi, anggota legislatif perempuan kota Bandar Lampung hanya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya saja dengan membuat kebijakan tanpa melihat masalah yang terjadi dilingkungan sekitar bahkan terhadap masalah sosial perempuan, anggota legislatif perempuan hanya memberikan nasihat saran dan solusi serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, lanjut Ibu Pebriani Piska dalam menanggapi yang telah dipaparkan oleh Ibu Nani Mayasari, yaitu:

“Fungsi legislatif saat ini bersuara, menyuarakan disaat rapat dan menyampaikan pendapat serta memfasilitasi dengan memberikan anggaran khusus, kepada dinas sosial untuk terus mengedukasi, dinas kesehatan agar terus memantau kesehatan memberikan vitamin dan lain sebagainya, memantau kesehatan ini dalam tanda kutip ya bukan berarti mensupport dan memfasilitasi namun kami memberikan sosialisasi dan edukasi bahaya penyakit seksual menular, agar tidak terindikasi karena memang kalau sampai terjangkit penyakit seksual menular bukan hanya merugikan pelaku namun juga akan memberikan ancaman bagi masyarakat sekitar.”³⁸

³⁷Pebrini Piska, Anggota Legislatif Perempuan, dari Fraksi Demokrat Komisi IV, wawancara dengan penulis, Ruang Fraksi Demokrat DPRD Kota Bandar Lampung, 17 September 2019

³⁸Nani Mayasari, Anggota Legislatif Perempuan, dari Fraksi Nasdem Komisi IV, wawancara dengan penulis, Ruang Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, 17 September 2019

3. Tidak adanya kebijakan khusus pemerintah terhadap masalah sosial prostitusi.

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung, yang saat ini masih dibayang-bayangi oleh masalah sosial prostitusi, namun pemerintah Kota Bandar Lampung belum menerapkan Peraturan Daerah untuk larangan prostitusi khususnya di daerah Panjang, dan Kota Bandar Lampung, hal tersebut disebabkan karena memang minimnya anggaran yang dimiliki untuk menangani masalah sosial tersebut, karena memang untuk menertibkan Kota dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, masalah sosial di Kota Bandar Lampung bukan hanya masalah prostitusi, contohnya seperti yang dapat kita amati di setiap sudut kota saat ini maraknya orang gila yang berkeliaran yang entah darimana asalnya, hal tersebut disampaikan oleh Ibu Nani Mayasari:

“Kebijakan mengenai perhatian khusus yang terfokus kepada masalah sosial prostitusi belum ada, namun anggota legislatif telah membuat Rancangan Peraturan Daerah 2019 dengan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka pemenuhan hak konstitusional perempuan dan setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyalahgunaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan yang merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan kalau untuk menutup prostitusi jujur saya sebagai wanita ingin sekali namun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki maka belum dapat mewujudkan hal tersebut, untuk menutup prostitusi itu bukan hal yang mudah tentunya kita harus memikirkan bagaimana mereka kedepannya bukan? Bagaimana kelangsungan hidup dan sumber perekonomian yang seharusnya dapat menggantikan hasil dari profesi lamanya. Dan saya juga berharap mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,

karena apa yang mereka lakukan untuk melakukan pelayanan jasa seksual pasti ada alasannya dan memang karena tuntutan ekonomi, serta sulitnya mencari pekerjaan dengan keterbatasan jenjang ijazah yang mereka miliki”.³⁹

4. Kepedulian anggota legislatif perempuan khususnya komisi IV hanya sebatas tugas dinas kependudukan dan dinas kesehatan.

Anggota legislatif perempuan Kota Bandar Lampung tentunya memiliki kepedulian terhadap masalah sosial prostitusi yang terjadi di Kota Bandar Lampung, namun dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki mereka hanya mampu memberikan anggaran sesuai dengan dana yang disediakan, anggota legislatif sejauh ini belum turun kelapangan secara langsung, namun kepedulian anggota legislatif dengan mempersiapkan anggaran agar dinas sosial, LSM, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan dinas lain yang terkait mampu melaksanakan tugas dan programnya pada wanita yang memberikan pelayanan jasa seksual, baik program edukasi tentang bahaya penyakit seksual menular dan pelayanan kesehatan khusus.

5. Pandangan anggota legislatif perempuan pada komisi lain terhadap masalah sosial prostitusi.

Selain melakukan wawancara dengan komisi IV yang memang seharusnya menangani masalah sosial yang terjadi pada masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ernita sebagai

³⁹Nani Mayasari, Anggota Legislatif Perempuan, dari Fraksi Nasdem Komisi IV, wawancara dengan penulis, Ruang Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, 17 September 2019

anggota legislatif perempuan yang berada dikomisi II mengenai kepeduliannya terhadap masalah sosial prostitusi yang terjadi dikecamatan Panjang, dengan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Untuk mengatasi masalah prostitusi kami sebagai anggota legislatif tentunya sangat ingin mengatasi masalah sosial tersebut, apalagi kita yaa sebagai perempuan, pemerintahan kota sudah melakukan penertiban kota, kehidupan itu kan suatu pilihan namun untuk menyelesaikan masalah tersebut kita harus melakukan pendekatan-pendekatan, baik kepada masyarakat, tokoh agama, dan kerjasama antara lembaga. Karena hal tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan dan kami sebagai pemeritahan pun baru mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Perempuan, kami melindungi perempuan dalam artian bukan memihak kepada prostitusi namun melindungi perempuan dari kekerasan-kekerasan serta mengusahakan adanya pemberdayaan perempuan agar dapat menciptakan keadilan dan perempuan layak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan.”⁴⁰

Pemaparan yang telah disampaikan dengan Ibu Ernita dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pendekatan-pendekatan agar mampu mengatasi masalah sosial tersebut secara perlahan tanpa harus menimbulkan gesekan antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan disana khususnya masyarakat yang berkecimpung dalam kegiatan prostitusi tersebut dan jangan sampai masyarakat lainnya terkena dampak negative dari masalah sosial yang terjadi.

Dalam penyelesaian suatu masalah sosial sangat diperlukannya kepedulian-kepedulian dari berbagai pihak agar mampu mengatasi

⁴⁰Ernita, SH. MH, Anggota Legislatif Perempuan dari Fraksi Demokrat, wawancara dengan penulis, Ballroom Hotel & Resto Emersia Lampung, 19 Oktober 2018.

masalah tersebut, berdasarkan teori dalam mengatasi sebuah masalah sosial poin pertama adalah dimensi kepedulian yaitu, lembaga legislatif khususnya bagi anggota perempuan harus terlebih dahulu mengetahui masalah sosial yang terjadi dikecamatan Panjang, selanjutnya anggota legislatif seharusnya turut hadir kelokasi dimana masalah sosial terjadi dengan pemnatauan secara langsung maka anggota legislatif lebih memahami hal-hal yang memang harus diatasi, setelah mengetahui keadaan dilapangan hendaknya anggota legislatif melakukan sesuatu memberikan tindakan-tindakan yang merupakan suatu upaya dalam penyelesaian masalah sosial prostitusi.

Memberikan fasilitas yang meyakinkan agar masyarakat pelaku prostitusi mendapatkan dukungan dan pilihan alternatif lain dalam menjalankan kehidupannya agar tidak selamanya terjebak dalam keadaan yang mereka jalani saat ini. Dan hendaknya anggota legislatif beserta jajaran pemerintahan kota yang bergerak dibidang sosial mampu mempertahankan keadaan apabila sudah teratasinya masalah sosial yang trejadi. Namun pada pelaksanaannya anggota legislatif belum menerapkan langkah-langkah tersebut dalam pemecahan masalah sosial prostitusi, belum ada ketegasan peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah sosial pristitusi tersebut. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ibu Erika Novalia Sani komisi III mengenai tingkat kepeduliannya:

“Masalah sosial dikecamatan Panjang tentunya sudah menjadi rahasia umum, untuk turun mengatasi masalah sosial prostitusi

saya terusterang memang belum pernah, mungkin teman-teman dikomisi IV yang pernah karena memang memang mereka yang menangani masalah sosial dan kesejahteraan, mengenai peraturan daerah yang berkaitan dengan prostitusi belum ada, masalah sosial prostitusi bukanlah masalah yang kecil dan dapat begitu saja ditutup, sangat dibutuhkan strategi dan kesiapan dana yang cukup besar agar mampu memberikan bantuan fasilitas hidup dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing.”⁴¹

Lanjut Ibu Wiwik Anggaraini komisi III, bahwa:

“Sebagai seorang perempuan jelas saja saya sedih melihat seorang perempuan yang bekerja memberikan jasa seksual untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, namun itu juga kan pilihan mereka untuk melakukan pekerjaan seperti itu, ya namanya jaman sekarang kebanyakan orang hanya ingin melakukan hal-hal mudah yang mampu menghasilkan pendapatan yang bisa menutupi kebutuhan hidup, ada yang terpaksa karena memang keterbatasan pendidikan untuk bekerja ditempat lain, bahkan bisa saja ada yang memang mencari jalan pintas biar cepet kaya tanpa harus melakukan pekerjaan yang rumit menurut dia. Memang hidup itu pilihan, menurut saya memang sangat diperlukannya edukasi-edukasi mengenai bahaya penyakit seksual menular, dan bahayanya profesi yang diatekuni untuk masa depan diri sendiri dan oranglain, saya rasa komisi IV perlu memberikan perhatian khusus terkait masalah tersebut.”⁴²

Ibu Sri Ningsih Djamsari komisi II, juga mengutarakan pendapatnya mengenai masalah sosial prostitusi yang menurutnya memang harus segera diberi tindakan khusus, yaitu:

“Mungkin bukan hanya saya dan teman-teman legislatif yang merasa prihatin atas masalah sosial tersebut bahkan seluruh perempuan di Lampung pun bisa merasakan itu gitu, kalau untuk upaya jujur saja saya tidak memiliki kewenangan dibidang itu, karena memang kita telah memiliki misi masing-masing yang harus

⁴¹Erika Novalia Sani, Anggota Legislatif Perempuan, dari Fraksi Nasdem Komisi III, wawancara dengan penulis, Ruang Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, 23 Maret 2019

⁴²Wiwik Anggraini, Anggota Legislatif Perempuan, dari Fraksi PDIP Komisi III, wawancara dengan penulis, Ruang Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, 23 Maret 2019

dimaksimalkan dan tugas pokok, fungsi yang memang harus dijalankan. Namun ada baik nya juga kalau saya bersama team wanita lainnya atau anggota legislatif perempuan khususnya sesuai dengan judul penelitianmu ini menarik juga gitu menurut saya. Mungkin periode ini kami belum memikirkan secara khusus dalam lingkup masalah sosial yang memang membutuhkan perhatian khusus dari seluruh perempuan yang bukan hanya LSM, dan dinas sosial yang bekerja. Mungkin ini merupakan masukan juga yaa untuk kami khususnya sebagai anggota legislatif perempuan nanti saya akan membicarakan dengan teman yang lain, semoga saja diroda pemerintahan anggota legislatif periode yang akan datang, akan mengupayakan secara bertahap dalam meminimalisir masalah sosial tersebut. Walaupun tidak mungkin ya rasanya untuk merubah secara drastis namun saya yakin bisa diupayakan.”⁴³

6. Hambatan anggota legislatif perempuan dalam penanggulangan masalah sosial prostitusi.

Masalah sosial prostitusi yang terjadi dikota Bandar Lampung belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah baik tingkat kota ataupun tingkat provinsi, tidak adanya kepedulian khusus yang dibentuk oleh anggota legislatif khususnya anggota legislatif perempuan sehingga tidak dapat memberikan solusi dalam penanggulangan masalah sosial prostitusi. Tidak adanya peraturan daerah yang mengkhususkan bagi ketentuan-ketentuan lain dibekas lokalisasi kecamatan Panjang sehingga sampai saat ini masih terus berjalan bisnis prostitusi. Namun anggota legislatif perempuan kota Bandar Lampung memberikan penjelasan bahwa keterbatasan anggaran dana yang ada dalam pemerintahan merupakan hambatan terbesar pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial tersebut.

⁴³Sri Ningsih Djamsari, Anggota Legislatif Perempuan, dari Fraksi Demokrat Komisi II, wawancara dengan penulis, Ruangan Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung, 15 Mei 2019

Hasil wawancara yang telah didapatkan oleh peneliti memberikan jawaban atas rasa keingintahuan peneliti terhadap kepedulian pemerintah khususnya anggota legislatif perempuan terhadap masalah sosial dibekas lokalisasi, dibenarkan bahwa kebijakan pemerintahan seharusnya mampu memberikan pelayanan sosial namun juga harus mampu untuk memproteksi hak perempuan dan mampu mencegah adanya masalah sosial seperti prostitusi ataupun lokalisasi. Untuk menangani persoalan tersebut hendaknya anggota legislatif mampu melahirkan perda terkait penanganan kepedulian masalah sosial bisnis jasa seksual baik ditempat ekslokalisasi yang masih terpantau dan prostitusi lainnya seperti prostitusi online atau dilatarbelakangi sebagai pemandu lagu demi ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang kelak dapat mempengaruhi generasi-generasi muda Bangsa.

Harapan atas terlahirnya perda penanganan dan kepedulian masalah sosial bisnis jasa seksual, dan terlaksananya pemberdayaan perempuan seperti yang terlampir pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Perlindungan Perempuan, hendaknya pemerintah khususnya anggota legislatif perempuan mempersiapkan strategi dan meminta dukungan baik secara teori dan anggaran kepada pemerintah pusat serta hubungan yang erat dengan lembaga petugas lapangan, agar terciptanya Kota Bandar Lampung yang terbebas dari masalah sosial prostitusi dan bisnis jasa seksual, dengan demikian selain

menetapkan perda hendaknya anggota legislatif perempuan dengan *teamm* melakukan pendekatan-pendekatan.

Pendekatan kemanusiaan dimana anggota legislatif perempuan harus mengenali kondisi lapangandan ikut serta memantau keadaan dilapangan, memberikan pelatihan kewirausahaan, dengan menyisipkan upaya-upaya pendekatan Agama seperti yang telah diterapkan oleh Anggota Legislatif Komisi IV Bapak Hendrie Kurniawan Fraksi PKS yang melakukan pembinaan pengajian dimushola yang berada di ekslokalisasi dengan memberikan *Spiritual Building Training*.

B. Pengaruh Kepedulian Anggota Legislatif Perempuan Dalam Mengatasi Masalah Sosial Prostitusi.

Anggota legislatif perempuan belum melakukan tinjauan lapangan di ekslokalisasi Kecamatan Panjang, namun telah memberikan masukan saran serta pemantauan terhadap dinas sosial, dinas kesehatan, dan lainnya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanganan masalah sosial tersebut, dengan adanya pembuatan akte kelahiran khusus bagi anak dari seorang wanita pekerja seksual, sehingga anak tersebut mampu mendapatkan hak-haknya seperti bersekolah dan sebagainya.

Dengan adanya pengawasan serta anggaran yang diajukan oleh anggota legislatif kepada dinas sosial dan dinas kesehatan, maka wanita pekerja seksual mendapatkan edukasi bahaya penyakit seksual menular

dan mendapatkan pelayanan kesehatan khusus seperti vitamin dan sebagainya yang dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali dan pelaksanaan test HIV/AIDS setiap tiga bulan sekali dipuskesmas terdekat. Seperti yang disampaikan oleh mba Ayu (nama samaran) sebagai seorang pekerja jasa seksual mengakui, bahwa:

“Sejauh ini belum pernah ada anggota legislatif perempuan yang mengunjungi kami atau bahkan memberikan kami bantuan, kalau dari dinas kesehatan iyaa kami selalu mengecek kesehatan dan melakukan test HIV/AIDS setiap tigabulan sekali, atau bahkan hanya seminar-seminar yang mendidik bahaya penyakit seksual menular, karena memang saya sudah hampir 3tahun tinggal disini dengan profesi seperti ini, namun memang belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah ataupun upaya pemberdayaan wanita, dan upaya pemberian lapangan pekerjaan.”⁴⁴

Sampai saat ini Ayu dan rekan-rekannya yang lain merasa belum pernah mendapatkan perhatian khusus ataupun sedikit kepedulian dari lembaga legislatif khususnya perempuan, namun berdasarkan hasil wawancara dengan anggota legislatif perempuan komisi IV, mereka telah membantu mengupayakan mempermudah dalam pembuatan akte kelahiran yang digunakan seorang anak yang tidak memiliki seorang ayah agar mampu mendapatkan hak pendidikan seperti anak lainnya, hal tersebut dijawab oleh, Nia (nama samaran) sebagai seorang pekerja seksual yang memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini duduk dibangku kelas 1 Sekolah Dasar.

“Iya saya sudah cukup lama tinggal disini, dan saya belum menikah namun saya sudah memiliki seorang anak, anak saya

⁴⁴ Ayu, Pekerja Jasa Seks (PSK), wawancara dengan penulis, eks lokalisasi Panjang Kecamatan Way Lunik, Bandar Lampung, 27 Agustus 2019.

laki-laki sekarang bersekolah duduk dibangku kelas 1 SD, dulu waktu anak saya mulai memasuki usia sekolah saya bingung karena salah satu persyaratan berkas adalah akte kelahiran dan anak saya tidak bisa memiliki akte kelahiran karena memang tidak memiliki ayah, ketika ingin mendaftarkan anak saya sekolah pihak sekolah menyarankan agar saya meminta bantuan ke kelurahan dan meminta solusi yang tepat ternyata memang sudah ada jalur khusus dan fasilitas bagi seorang anak seperti anak saya. Ya syukur Alhamdulillah ya, akhirnya anak saya bisa memiliki akte kelahiran dan akhirnya anak saya bisa sekolah seperti anak yang lain, sebenarnya sejak kelahiran bidan sudah mengingatkan saya untuk memproses hal tersebut, cuma ya saya cuek aja belum kepikiran mau bagaimana kedepannya.”⁴⁵

Kepedulian anggota legislatif saat ini hanya sejauh pengamatan dan pelayanan akte kelahiran bagi anak wanita pekerja seksual, serta edukasi bahaya penyakit seksual menular yang sudah berjalan dengan baik, namun kurang membantu dalam pemecahan masalah sosial prostitusi seperti solusi yang diharapkan agar mampu memberdayakan perempuan dengan baik dan dengan semestinya.

⁴⁵Nia, Pekerja Jasa Seks (PSK), wawancara dengan penulis, eks lokalisasi Panjang Kecamatan Way Lunik , Bandar Lampung , 27 Agustus 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kurangnya kepedulian secara khusus anggota legislatif perempuan terhadap masalah sosial prostitusi yang terjadi diekslokalisasi Kecamatan Panjang, adapun sedikit kepedulian anggota legislatif perempuan yang sudah terlaksana, yaitu:

1. Pembuatan akte kelahiran bagi anak seorang pekerja seksual yang tidak memiliki ayah.
2. Penganggaran dana untuk edukasi bahaya seksual menular dan pelayanan kesehatan khusus.

Berdasarkan dimensi kepedulian anggota legislatif tidak menerapkan dan melaksanakan dimensi tersebut.

1. Mengetahui

Anggota legislatif telah mengetahui, bahwa terdapat suatu masalah sosial prostitusi dibekas lokalisasi kecamatan Panjang.

2. Turut Hadir

Anggota legislatif perempuan tidak ikut serta dalam penanganan masalah sosial, dan tidak mengetahui bagaimana kondisi sesungguhnya dibekas lokalisasi kecamatan Panjang.

3. Melakukan

Anggota legislatif perempuan tidak melakukan tindakan secara langsung dalam penanganan masalah sosial prostitusi yang terjadi dibekas lokalisasi kecamatan Panjang.

4. Memungkinkan

Anggota legislatif perempuan hanya memberikan fasilitas anggaran dana dan solusi-solusi kepada dinas sosial dan lembaga terkait lainnya, tanpa memberikan fasilitas khusus yang mendukung proses penyelesaian masalah sosial yang terjadi dibekas lokalisasi kecamatan Panjang.

5. Mempertahankan

Tidak memberikan dukungan dan keyakinan terhadap masyarakat sekitar dibekas lokalisasi terutama bagi pelaku pekerja seksual.

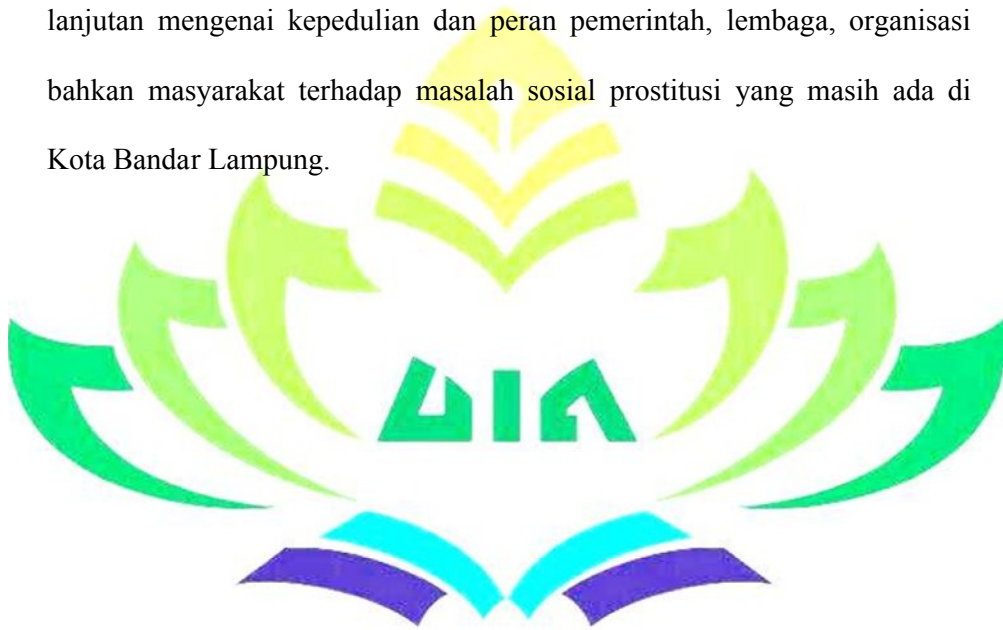
Hambatan anggota legislatif perempuan dalam kepedulian terhadap masalah sosial prostitusi ialah keterbatasan anggaran yang dimiliki serta belum adanya perhatian khusus pemerintah terhadap masalah sosial prostitusi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlunya peningkatan kepedulian dan pengawasan terhadap masalah sosial yang masih terjadi diekslokalisasi Kecamatan Panjang.

2. Perlunya kesadaran bagi pelaksana tugas lapangan dan tanggung jawab, harus lebih ditingkatkan agar terealisasinya tujuan dalam penanganan masalah sosial prostitusi yang terjadi di Kota Bandar Lampung, khususnya Kecamatan Panjang.
3. Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan, dan jauh dari kata sempurna. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dilakukan penelitian lanjutan mengenai kepedulian dan peran pemerintah, lembaga, organisasi bahkan masyarakat terhadap masalah sosial prostitusi yang masih ada di Kota Bandar Lampung.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, A.S. 1984. *Pelacuran dan Pemerasan*. Alumni Bandung. Jakarta.
- Ambong, Ibrahim, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. PT. Rineka Cipta : Jakarta
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017/2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Azzahra*. Bandung :Syamil Qur'an 2007.
- Devos Rich, *Kepedulian Sosial*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Dr. Hakiki Kiki Muhammad, *Religi Pekerja Seks Komersial (PSK)*, Bandar Lampung :Hak Cipta, 2016.
- Elly M. setiadidan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Kencana Prenada media Group, Jakarta: 2011.
- Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2002.
- Herdiansyah, Haris.2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika. Jakarta
- Jamaluddin Mahfuzh, *Psikologi Anak Dan Remaja Muslim*, penerjemah Abdul Rosyadshiddiq, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001
- Kamal Khalid As Suyuthi Syaikh Muhammad bin, *Kumpulan Hadist Yang Disepakati 4 Imam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Kartono Kartini, *Patologi sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- , *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- , *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju 1996.
- Louer Robert, *Masalah-masalah Sosial*. Jakarta :Rineka Cipta. 2001.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2014.

Nurboco Kholiddan Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bandung : PT.Bumi Aksara, 1997.

Prof Dr. Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Prenada media Group, Jakarta, Prenada media Group, 2010.

Toni Andrianus Pito, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampa iKorupsi*, Bandung :Penerbit Nuansa Cendekia, 2013.

Online

<http://karakter0809.weebly.com/definisi-kepedulian-sosial.html>

http://kesmas-ode.blogspot.com/2012/11/prostitusi_3010.html

Artikel “Pelacuran sebagai Masalah Sosial” dalam www.academia.edu., diposting pada Desember 2013, diakses pada 9 Agustus 2019.

Sumber Jurnal

Elvita Sofianti, Persepsi masyarakat terhadap mantan PSK (pekerja seks Komersial) yang telah berkeluarga (studi di kampung rawa laut kelurahan panjang selatan kota Bandar lampung)”. (skripsi Universitas lampung, Bandar lampung, 2016).

Siti Maya Sari, Persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislative di lingkungan II kelurahan gedung meneng baru Bandar lampung tahun 2015”. (skripsi universitas lampung, Bandar lampung, 2016).